

PENDIDIKAN KARAKTER & MERDEKA BELAJAR

KONSEP DAN APLIKASI

Dr. Kurotul Aeni S.Pd M.Pd



**Pendidikan Karakter & Merdeka Belajar:
Konsep dan Aplikasi**

Penulis:

Dr. Kurotul Aeni S.Pd M.Pd

Penyunting:

Agil Widiatmoko

Perancang Sampul & Isi:

Sani Aryo Subekti

Cetakan Pertama, September 2021

v+137 hlm.; 13x19 cm

ISBN: 978-623-96434-2-3

Diterbitkan oleh:

Eiga Media

Jalan pandean II, No 66, Gandok,

Condong Catur, Depok,

Sleman, D.I Yogyakarta

Kontak : 081215278180

Email : eigapenerbit@gmail.com

Kata Pengantar

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul “Pendidikan Karakter & Merdeka Belajar: Konsep dan Aplikasi” dapat diselesaikan untuk menambah khasanah keilmuan baik itu bagi mahasiswa, pendidik, akademisi, praktisi, maupun elemen-elemen lainnya yang berkecimpung dalam dunia pendidikan.

Dalam proses penulisan Buku ini, penulis yang berprofesi sebagai salah satu dosen jurusan Pendidikan Sekolah Dasar (PGSD), Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, mencoba melaksanakan kewajiban yang sudah termuat di dalam Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

KATA PENGANTAR

Apalagi dalam beberapa kali penelitian yang dilakukan oleh penulis, juga berfokus pada implementasi dari pendidikan karakter. Saat ini, pendidikan karakter menjadi salah satu strategi kebijakan guna merespons perubahan dan perkembangan zaman, karena karakter seorang manusia adalah ruh dari proses pendidikan. Oleh karena itu Penguatan Pendidikan Karakter akan menjadi salah satu penentu bagi suatu bangsa dalam berpijak menatap masa depan.

Buku ini tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan yang tidak dapat dihindari oleh penulis. Semua kesalahan dan kekurangan dalam buku ini tentu menjadi tanggungjawab penulis sepenuhnya. Guna perbaikan buku ini nantinya, kritik dan saran terhadap buku ini tentu sangat diharapkan oleh penulis.

Namun, penulis meyakini bahwa kehadiran Buku ini tetap akan memberikan kebermanfaatan, karena apa yang ditulis dalam buku ini bertujuan untuk membumikan gagasan tentang Penguatan Pendidikan Karakter, dengan beberapa elemen pendukungnya yaitu modal sosial, media sosial, pendidikan multikultural, budaya sekolah, dan merdeka belajar.

Tegal, 2 September 2021

Dr. Kurotul Aeni S.Pd M.Pd

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bagian I	
Urgensi Penguatan Pendidikan Karakter	1
A. Hakikat Pendidikan Karakter	5
B. Dimensi Pendidikan Karakter	7
C. Nilai dan Aspek Pendidikan Karakter	8
D. Pendekatan Dalam Pendidikan Karakter	10
E. Strategi Penguatan Pendidikan Karakter	20
F. Metode Internalisasi Pendidikan Karakter	22
G. Indikator Pendidikan Karakter di Sekolah	24
H. Penilaian Pendidikan Karakter	36
Bagian II	
Modal Sosial Sebagai	
Penguatan Pendidikan Karakter	43
A. Pengertian Modal Sosial	43
B. Dimensi Modal Sosial	46
C. Indikator Modal Sosial	48

D. Pengukuran Modal Sosial	49
E. Modal Sosial Dalam Implementasi Pendidikan Karakter	51

Bagian III

Media Sosial: Sarana

Penguatan Pendidikan Karakter	59
A. Definisi Media Sosial	59
B. Manfaat Media Sosial	61
C. Macam-macam Media Sosial	62
D. Peran Media Sosial di Masa Pandemi	65
E. Media Sosial Dalam Penguatan Pendidikan Karakter	68

Bagian IV

Pendidikan Multikultural Dalam

Dimensi Pendidikan Karakter	75
A. Pendidikan Dalam Kerangka Kebudayaan	75
B. Definisi Pendidikan Multikultural	78
C. Tujuan Pendidikan Multikultural	84
D. Dimensi Pendidikan Multikultural	86

Bagian V

Budaya Sekolah dan

Penguatan Pendidikan Karakter	91
--------------------------------------	----

DAFTAR ISI

A. Hakekat Budaya Sekolah	91
B. Pengembangan Budaya (Kultur Sekolah)	94
C. Pelaksanaan Budaya Sekolah	101

Bagian VI

Integrasi Merdeka Belajar Dalam Penguatan Pendidikan Karakter 109

A. Konsepsi Merdeka Belajar	109
B. Landasan Hukum Pelaksanaan Merdeka Belajar	111
C. Tahapan Implementasi Merdeka Belajar	113
D. Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar	116
E. Prinsip-prinsip Merdeka Belajar	121
F. Merdeka Belajar dan Penguatan Pendidikan Karakter	122

Daftar Pustaka	129
Tentang Penulis	136

Bagian I

Urgensi Penguatan Pendidikan Karakter

Abad berganti, dunia berubah, tantangan ikut bertambah. Tim Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia menyebut perubahan-perubahan fundamental yang terjadi di berbagai sendi kehidupan—sebagai konsekuensi perubahan zaman—dapat diantisipasi dengan menguatkan pendidikan karakter.

Perubahan-perubahan fundamental yang dimaksud adalah sebagai berikut. (1) Revolusi Industri 4.0 atau biasa disebut Revolusi Digital. Revolusi ini mengubah sendi-sendi kehidupan, kebudayaan, peradaban, dan kemasyarakatan, melalui apa yang dikenal sebagai ekonomi platform, internet hal-ihwal (*internet of things*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan data raya (*big data*). (2) Integrasi belahan-belahan dunia yang

semakin intensif akibat internasionalisasi, globalisasi, dan hubungan-hubungan multilateral mengubah pola interaksi antara negara, korporasi, dan individu. (3) Tumbuhnya masyarakat padat pengetahuan (*knowledge society*), masyarakat informasi (*information society*), dan masyarakat jaringan (*network society*) yang membuat pengetahuan, informasi, serta jaringan menjadi modal penting dan utama. (4) Berkembangnya masyarakat kreatif yang menempatkan kreativitas dan inovasi sebagai modal penting untuk individu, perusahaan, dan masyarakat. (5) Perubahan dunia itu sendiri yang berlangsung begitu cepat sehingga dunia tampak lari tunggang langgang (*runaway world*) membuat ruang tampak menyempit, waktu terasa ringkas, dan keusangan segala sesuatu cepat terjadi. Kelima hal tersebut pada akhirnya memunculkan tatanan baru, standar-standar baru, kebutuhan-kebutuhan baru, dan tantangan-tantangan baru yang sama sekali lain dari abad sebelumnya (Tim PPK Kemendikbud, 2017: 1).

Perubahan-perubahan juga terjadi dalam bidang pendidikan. Dunia abad ke-21 memiliki imperatif-imperatif global terhadap bidang pendidikan, seperti Pendidikan untuk semua, Pendidikan bagi Pembangunan Berkelanjutan, Tujuan Pembangunan Milenium, dan Literasi Dunia bagi Pemberdayaan. Imperatif-imperatif itu coba menyerukan tujuan-tujuan yang seharusnya dicapai oleh pendidikan. Hal tersebut diiringi dengan kemunculan pemikiran-

pemikiran baru mengenai pembelajaran (misalnya *blended learning* dan *mindful learning*), yang akhirnya menuntut adanya kebijakan baru dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Lebih jauh lagi, perubahan-perubahan tersebut mendorong terjadinya pergeseran peranan dan fungsi pendidikan dalam masyarakat, serta bentuk organisasional dalam bidang pendidikan. Hal tersebut pada gilirannya memunculkan tantangan, tuntutan, dan kebutuhan baru dalam sendi-sendi pendidikan termasuk sendi-sendi pendidikan nasional Indonesia (Tim PPK Kemendikbud, 2017: 2).

Dalam rangka merespons perubahan-perubahan tersebut, maka diselenggarakan Penguatan Pendidikan Karakter dalam bidang pendidikan nasional. Mengapa dimulai dari pendidikan? Sebab bangsa-bangsa di dunia yang kini terbukti maju dan mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut, seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Finlandia ditopang oleh sistem pendidikan yang baik, maju, dan bermutu (Tim PPK Kemendikbud, 2017: 3).

Mengapa dimulai dari pendidikan karakter? Sebab karakter seorang manusia adalah ruh dari proses pendidikan. Selain mengasah kompetensi intelektualitas, pendidikan juga harus mengasah potensi karakter peserta didik, agar kuat dan tangguh, guna mengatasi pelbagai tantangan, tuntutan, kebutuhan, dan perubahan setiap zaman.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, yang memandang bahwa “Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita” (Ki Hadjar Dewantara, [1962], dalam Tim PPK Kemendikbud, 2017: 4).

Pendidikan karakter di Indonesia sebenarnya sudah dicanangkan sejak tahun 2010 melalui Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter Bangsa yang melahirkan sekolah-sekolah rintisan penggerak pendidikan karakter di seluruh Indonesia. Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter, berkomitmen melanjutkan, mengoptimalkan, memperdalam, serta memperluas pendidikan karakter yang sudah berjalan.

Berkenaan dengan itu gerakan Penguatan Pendidikan Karakter menempati kedudukan yang fundamental dan strategis karena menjalankan agenda Nawacita Nomor 8, yaitu “Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan

cinta Tanah Air” yang mana juga bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Selain itu, gerakan Penguatan Pendidikan Karakter juga menjalankan mandat Trisakti, yakni “Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, Berkepribadian dalam Kebudayaan”, serta RPJMN 2015-2019 yang berbunyi “Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran” (Setjen Kemendikbud, 2017: 4). Dengan demikian, gerakan Penguatan Pendidikan Karakter merupakan salah satu pintu awal untuk mewujudkan Revolusi Mental, agenda Nawacita No. 8, serta mandat Trisakti, yang pada gilirannya akan menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, yang mampu mengatasi pelbagai tantangan, tuntutan, kebutuhan, dan perubahan zaman.

A. Hakikat Pendidikan Karakter

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menyebut hakikat dari pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik (Badan Penelitian

dan Pengembangan Kemendiknas, 2011: 7). Hal tersebut sejalan dengan pendapat psikolog sekaligus pengusung istilah 'pendidikan karakter', Thomas Lickona, yang mengatakan pendidikan karakter selalu melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*).

Ia mengatakan, "*character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior. Good character consists of knowing the good, desiring the good, doing the good-habits of the mind, habits of the heart, and habits of action* (Lickona, 1991: 51)." Karakter yang baik terdiri dari mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai atau menginginkan kebaikan (*loving or desiring the good*), dan melakukan kebaikan (*acting the good*). Cara membentuk karakter yang efektif adalah dengan melibatkan ketiga aspek tersebut. Dengan demikian potensi yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bukan potensi kognitif belaka, tetapi juga potensi rasa dan raga.

Sementara itu, dalam konteks yang lebih luas, Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyebutkan, hakikat pendidikan nasional adalah untuk "mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Penjelasan soal “menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” itu sendiri telah memuat hakikat dari pendidikan karakter. Dengan demikian, hakikat pendidikan karakter dalam konteks pendidikan nasional Indonesia adalah menjadikan karakter manusia Indonesia sesuai dengan nilai-nilai yang berakar dari falsafah Indonesia (Istiningasih, 2016: 35).

B. Dimensi Pendidikan Karakter

Pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*) adalah dimensi dari pendidikan karakter sebagaimana disebut oleh Thomas Lickona. Sementara itu Tim PPK Kemendikbud menyebut ada empat dimensi dari pendidikan karakter, yaitu olah pikir (literasi), olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), dan olah raga (kinestetik). Olah hati tercermin dari individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa. Olah rasa tercermin dari individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan.

Olah raga tercermin dari individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Sementara itu, olah pikir tercermin dari individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat.

Dalam hal ini, Tim PPK Kemendikbud menyebut pendidikan nasional Indonesia cenderung melewatkan atau mengabaikan beberapa dimensi penting dalam pendidikan, yaitu olah raga, olah rasa, dan olah hati. Apa yang selama ini senantiasa dikembangkan baru sebatas olah pikir yang menumbuhkan kecerdasan akademis (Tim PPK Kemendikbud, 2017: 6). Tim PPK Kemendikbud pun menilai perlu dilakukan harmonisasi atas keempat dimensi tersebut. Dengan demikian tujuan dari pendidikan karakter adalah untuk mengharmonisasi olah pikir, olah, hati, olah rasa, dan olah raga.

C. Nilai dan Aspek Pendidikan Karakter

Tim PPK Kemendikbud menyebut ada lima nilai utama dalam penguatan pendidikan karakter. Kelima nilai ini saling terkait dan tidak berdiri sendiri-sendiri (Tim PPK Kemendikbud, 2017: 8-10).

1. Nilai Religius

Nilai karakter religious mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini terwujud dalam pelaksanaan ajaran agama dan kepercayaan yang

dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, serta hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Nilai karakter religius ini meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesamanya, dan individu dengan alam semesta (lingkungannya). Nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam perilaku mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan Tuhan.

2. Nilai Nasionalis

Nilai karakter nasionalis mewujudkan dalam cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok. Sikap apresiasi dan menjaga budaya bangsa, taat pada hukum, disiplin, dan menghormati keragaman suku, budaya termasuk dalam nilai karakter nasionalis.

3. Nilai Kemandirian

Nilai karakter mandiri terwujud dalam sikap dan perilaku yang tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga dan pikiran diri sendiri untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Memiliki etos kerja keras, bersikap tangguh, berani, dan berdaya juang juga termasuk nilai kemandirian.

4. Nilai Gotong Royong

Nilai karakter gotong royong tercermin dalam tindakan kerja sama dan bahu-membahu dalam menyelesaikan persoalan. Menjalin komunikasi, setia kawan, memberikan bantuan, bersikap inklusif, mengedepankan musyawarah mufakat, anti-diskriminasi juga termasuk nilai karakter gotong royong.

5. Nilai Integritas

Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku dalam upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, baik dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan dengan memegang teguh nilai kemanusiaan dan moral. Bersikap tanggung jawab, jujur, adil, anti-korupsi, dan menghargai martabat orang lain termasuk dalam nilai integritas.

D. Pendekatan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan suatu pembiasaan, maka pembentukan karakter seseorang itu memerlukan *communities of character* atau komunitas masyarakat yang bisa membentuk karakter. Dalam konteks ini, peran sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai *communities of character* dalam pendidikan karakter sangat penting. Sekolah mengembangkan proses pendidikan karakter melalui proses pembelajaran, habituasi atau pembiasaan, kegiatan ekstra-kurikuler, dan bekerja sama dengan

keluarga dan masyarakat dalam pengembangannya (Kevin & Karen, 1999).

Tim PPK Kemendikbud menilai sinergi tanggung jawab terhadap pendidikan karakter anak antara sekolah, orang tua dan masyarakat belum berlangsung dengan optimal. Oleh karena itu pendekatan pendidikan karakter dibagi berdasarkan basis kelas dan sekolah serta orang tua dan masyarakat (Tim PPK Kemendikbud, 2017: 27). Ketiga pendekatan ini saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Pendekatan ini dapat membantu satuan pendidikan dalam merancang dan mengimplementasikan program dan kegiatan PPK.

1. PPK Berbasis Kelas

a) Pengintegrasian PPK dalam Kurikulum

Pengintegrasian PPK dalam kurikulum mengandung arti bahwa pendidik mengintegrasikan nilai-nilai utama PPK dalam proses pembelajaran dalam setiap mata pelajaran. Pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter dimaksudkan untuk menumbuhkan dan menguatkan pengetahuan, menanamkan kesadaran, dan mempraktikkan nilai-nilai utama PPK. Pendidikan dapat memanfaatkan secara optimal materi yang sudah tersedia di dalam kurikulum secara kontekstual dengan penguatan nilai-nilai utama PPK. Dengan demikian PPK tidak bermaksud mengganti kurikulum materi yang sudah

ada, tetapi bermaksud agar kurikulum yang sudah ada menyerap dan memuat nilai-nilai utama dari PPK.

b) PPK Melalui Pilihan dan Penggunaan Metode Pembelajaran

Penguatan Pendidikan Karakter terintegrasi dalam kurikulum juga dapat dilakukan melalui pembelajaran di kelas dengan metode pembelajaran tertentu. Guru harus pandai memilih agar metode pembelajaran yang digunakan ikut menanamkan pembentukan karakter peserta didik. Metode pembelajaran yang dipilih diharapkan dapat membuat peserta didik memiliki keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21 seperti kecakapan berpikir kritis (*critical thinking*), berpikir kreatif (*creative thinking*), kecakapan berkomunikasi (*communication skill*), termasuk penguasaan bahasa internasional, serta kerjasama dalam pembelajaran (*collaborative learning*). Beberapa metode pembelajaran yang dapat dipilih guru secara kontekstual, antara lain (Tim PPK Kemendikbud, 2017: 29):

- 1) Metode pembelajaran saintifik (*scientific learning*), sebagai metode pembelajaran yang didasarkan pada proses keilmuan dengan ocusu kegiatan mulai dari merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik simpulan.
- 2) Metode pembelajaran berbasis masalah (*problem-*

based learning), yaitu metode pembelajaran yang memfokuskan pada identifikasi serta pemecahan masalah nyata, praktis, kontekstual, berbentuk masalah yang strukturnya tidak jelas atau belum jelas solusinya (*ill-structured*) atau *open ended* yang ada dalam kehidupan peserta didik sebagai titik sentral kajian untuk dipecahkan melalui prosedur ilmiah dalam pembelajaran, yang kegiatannya biasanya dilaksanakan secara berkelompok.

- 3) Metode pembelajaran berbasis teks (*text-based instruction*), yaitu pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan peserta didik untuk ocusun teks. Metode pembelajaran ini mendasarkan diri pada pemodelan teks dan analisis terhadap fitur-fiturnya secara eksplisit serta focus pada hubungan antara teks dan konteks penggunaannya. Perancangan unit-unit pembelajarannya mengarahkan peserta didik agar mampu memahami dan memproduksi teks baik lisan maupun tulisan dalam berbagai konteks. Untuk itu, siswa perlu memahami fungsi sosial, struktur, dan fitur kebahasaan teks (Tim PPK Kemendikbud, 2017: 30).
- c) PPK dengan Mata Pelajaran Khusus
- Penguatan Pendidikan Karakter secara umum dilakukan dengan cara mengintegrasikan PPK dalam mata pelajaran yang sudah ada (terintegrasi dalam

kurikulum). Namun, sekolah bisa pula mengajarkan nilai-nilai PPK melalui mata pelajaran khusus yang berfokus pada tema nilai-nilai tertentu. Sekolah mendesain mata pelajaran khusus dengan alokasi waktu khusus yang disediakan sebagai bagian dalam pembentukan karakter peserta didik. Tema-tema yang mengandung nilai utama PPK diajarkan dalam bentuk pembelajaran di kelas dengan metode pembelajaran yang selaras sehingga dapat semakin memperkaya praksis PPK di sekolah. Tema-tema yang diambil disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Satuan pendidikan mendesain sendiri tema dan prioritas nilai pendidikan karakter apa yang akan mereka tekankan dan menyediakan guru khusus atau memberdayakan guru yang ada untuk mengajarkan materi tentang nilai-nilai tertentu untuk memperkuat pendidikan karakter (Tim PPK Kemendikbud, 2017: 32).

d) Menyusun Jadwal Harian dan Mingguan

Agar gerakan PPK dapat berjalan optimal, satuan pendidikan dapat menyusun jadwal kegiatan harian atau mingguan untuk memperkuat nilai-nilai utama PPK yang telah dipilih sebagai upaya penguatan secara habituasi dan terintegrasi (Tim PPK Kemendikbud, 2017: 36).

e) Menentukan Nilai Utama PPK

Hal paling penting dari gerakan PPK, sekolah dapat

langsung menentukan nilai utama dari PPK untuk dijadikan ciri khas atau identitas sekolah tersebut. Pertama-tama sekolah memulai program PPK dengan melakukan asesmen awal. Salah satu kegiatan asesmen awal adalah bahwa satuan pendidikan memilih nilai utama yang akan menjadi fokus dalam pengembangan pembentukan dan penguatan karakter di lingkungannya. Pemilihan nilai utama ini didiskusikan, dimusyawarahkan, dan didialogkan dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah (kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan peserta didik). Bersamaan dengan itu, dirumuskan pula sejumlah nilai pendukung yang dipilih dan relevan. Sekolah mendeskripsikan bagaimana jalinan antarnilai utama tersebut, yaitu antarnilai utama yang dipilih dengan nilai pendukung. Seluruh pemangku kepentingan menyepakati nilai utama yang menjadi prioritas serta nilai pendukung, dan jalinan antarnilai dalam membentuk karakter warga sekolah, dan sekaligus tertuang dalam visi dan misi sekolah.

Nilai utama yang dipilih oleh satuan pendidikan menjadi fokus dalam rangka pengembangan budaya dan identitas sekolah. Seluruh kegiatan, program, dan pengembangan karakter di lingkungan satuan pendidikan berpusat pada nilai utama tersebut,

dan berlaku bagi semua komunitas sekolah. Satuan pendidikan menjabarkan nilai utama ini dalam indikator dan bentuk perilaku objektif yang bisa diamati dan diverifikasi. Dengan menentukan indikator, satuan pendidikan dapat menumbuhkan nilai-nilai pendukung yang lain melalui fokus pengalaman komunitas sekolah terhadap implementasi nilai tersebut. Dari nilai utama dan nilai-nilai pendukung yang sudah disepakati keunikan, kekhasan, dan keunggulan sekolah. Contoh: “Membentuk Satuan pendidikan dapat pula membuat logo sekolah, himne, dan mars sekolah yang sesuai dengan *branding*-nya masing-masing (Tim PPK Kemendikbud, 2017: 36).

f) PPK Berbasis Budaya Sekolah

Pendidikan karakter berbasis budaya sekolah merupakan sebuah kegiatan untuk menciptakan iklim dan lingkungan sekolah yang mendukung praksis PPK mengatasi ruang-ruang kelas dan melibatkan seluruh sistem, struktur, dan pelaku pendidikan di sekolah. Pengembangan PPK berbasis budaya sekolah termasuk di dalamnya keseluruhan tata kelola sekolah, desain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), serta pembuatan peraturan dan tata tertib sekolah. Penguatan Pendidikan Karakter berbasis budaya sekolah berfokus pada pembiasaan dan pembentukan budaya yang merepresentasikan

nilai-nilai utama PPK yang menjadi prioritas satuan pendidikan. Pembiasaan ini diintegrasikan dalam keseluruhan kegiatan di sekolah yang tercermin dari suasana dan lingkungan sekolah yang kondusif (Tim PPK Kemendikbud, 2017: 35).

g) Kegiatan Kokurikuler

Kegiatan kokurikuler dilakukan melalui serangkaian penugasan yang sesuai dengan target pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran yang relevan dengan kegiatan intrakurikuler. Kegiatan kokurikuler dapat dilaksanakan baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, tetapi kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan perencanaan pembelajaran (silabus) yang telah disusun oleh guru. Contohnya, dapat berupa kegiatan proyek, penelitian, praktikum, pengamatan, wawancara, latihan-latihan seni dan olah raga, atau kegiatan produktif lainnya baik dilaksanakan secara individu maupun kelompok. Kegiatan kokurikuler ini mesti memuat nilai-nilai PPK.

h) Ekstrakurikuler (pilihan dan wajib)

Penguatan nilai-nilai utama PPK sangat dimungkinkan dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler (ekskul). Kegiatan ekstrakurikuler tersebut bertujuan untuk mengembangkan kepribadian dan bakat peserta didik, sesuai dengan minat dan

kemampuannya masing-masing. Kegiatan ekstrakurikuler ada dua jenis, yaitu ekstrakurikuler wajib (kepramukaan) dan ekstrakurikuler pilihan (sesuai dengan kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan). Semua kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan tersebut harus memuat dan menegaskan nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam setiap bentuk kegiatan yang dilakukan. Meskipun secara implisit kegiatan ekstrakurikuler sudah mengandung nilai-nilai karakter, namun tetap harus diungkap secara eksplisit serta direfleksikan dan ditegaskan kembali di akhir kegiatan, agar peserta didik sadar dan paham (Tim PPK Kemendikbud, 2017: 41).

2. PPK Berbasis Masyarakat

Satuan pendidikan tidak dapat menutup diri dari kemungkinan berkolaborasi dengan lembaga, komunitas, dan masyarakat lain di luar lingkungan sekolah. Dapat melaksanakan visi dan misinya sendiri. Karena itu, berbagai macam bentuk kolaborasi dan kerja sama antarkomunitas dan satuan pendidikan di luar sekolah sangat diperlukan dalam penguatan pendidikan karakter. Satuan pendidikan dapat melakukan berbagai kolaborasi dengan lembaga, komunitas, dan organisasi lain di luar satuan pendidikan yang dapat menjadi mitra dalam Penguatan Pendidikan Karakter. Yang dimaksud dengan komunitas yang berada di luar satuan pendidikan di antaranya adalah sebagai

berikut (Tim PPK Kemendikbud, 2017: 42):

- a) Komunitas orang tua-peserta didik atau paguyuban orang tua, baik itu per-kelas maupun per-sekolah;
- b) Komunitas pengelola pusat kesenian dan budaya, yaitu berbagai perkumpulan, kelompok hobi, sanggar kesenian, bengkel teater, padepokan silat, studio musik, bengkel seni, dan lain-lain, yang merupakan pusat-pusat pengembangan kebudayaan lokal dan modern;
- c) Lembaga-lembaga pemerintahan (BNN, Kepolisian, KPK, Kemenkes, Kemenpora, dan lain-lain);
- d) Lembaga atau komunitas yang menyediakan sumber-sumber pembelajaran (perpustakaan, museum, situs budaya, cagar budaya, paguyuban pecinta lingkungan, komunitas hewan piaraan, dan lain-lain);
- e) Komunitas masyarakat sipil pegiat pendidikan;
- f) Komunitas keagamaan;
- g) Komunitas seniman dan budayawan lokal (pemusik, perupa, penari, pelukis, dan lain-lain);
- h) Lembaga bisnis dan perusahaan yang memiliki relevansi dan komitmen dengan dunia pendidikan;
- i) Lembaga penyiaran media, seperti televisi, koran, majalah, radio, dan lain-lain.

Adapun pengembangan program Penguatan Pendidikan Karakter melalui kerja sama/kolaborasi dengan komunitas harus didasarkan pada prinsip berikut. Pertama, penanggung jawab utama dalam setiap program dan kegiatan PPK di lingkungan sekolah adalah kepala sekolah; Kedua, fokus kolaborasi PPK dengan komunitas terutama diperuntukkan bagi peserta didik. Ketiga, prinsip kolaborasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum PPK, tidak melanggar nilai-nilai moral, dan tidak menjadikan sekolah sebagai objek pemasaran produk tertentu.

E. Strategi Penguatan Pendidikan Karakter

Guru Besar Universitas Warwick Des Hewitt mengatakan pendidikan saat ini mesti selaras dengan prinsip-prinsip dalam revolusi pembelajaran (learning revolution). Proses pembelajaran seharusnya berpijak pada pilar-pilar: active learning, creative learning, effective learning, and joyful learning (Hewitt, 2008). Jacques Delors juga mengatakan pembelajaran harus berpijak pada empat pilar pendidikan menurut UNESCO (*United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization*), yakni: *learning to know, learning to do, learning to be, and learning how to live together* (Delors *et al.*, 1996; dan Burnett, 2008). Sementara Tim PPK Kemendikbud menyebut beberapa strategi dalam rangka gerakan Penguatan Pendidikan Karakter.

1. Pembelajaran kolaboratif (*collaborative learning*)

Melalui pembelajaran ini, peserta didik berlatih bagaimana bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan sebuah proyek bersama. Fokus nilai dan keterampilan yang menjadi sasaran dalam strategi pembelajaran kolaboratif adalah kemampuan bekerja sama (Tim PPK Kemendikbud, 2017: 31).

2. Presentasi

Peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil pemikiran tulisan, dan kajiannya di depan kelas. Nilai yang dibangun dengan strategi ini adalah rasa percaya diri, kemampuan berkomunikasi, dan menyampaikan gagasan, serta kemampuan untuk mempertahankan pendapat dalam berargumentasi. Bagi peserta didik yang mempresentasikan, ia akan berlatih berargumentasi dengan baik. Bagi teman-teman sekelas, mereka akan belajar mengkritisi sebuah argumentasi dengan memberikan argumentasi lain yang lebih rasional dan berdasarkan data/fakta. Strategi ini akan memperkuat kemampuan untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi peserta didik.

3. Diskusi

Dalam pembelajaran, peserta didik perlu dilibatkan secara aktif bersama teman-temannya secara berkelompok, berintegrasi secara verbal, saling bertukar pikiran dan informasi, saling mempertahankan pendapat,

mengajukan usulan dan gagasan yang lebih baik, serta bersama-sama memecahkan masalah tertentu dalam pembelajaran. Fokus penguatan karakter pada strategi ini adalah kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, menghargai pendapat orang lain, percaya diri, dan mempengaruhi orang lain melalui tata cara berargumentasi yang baik.

4. Debat

Peserta didik perlu diberi kesempatan untuk beradu argumentasi dalam sebuah perdebatan yang topiknya dipilih secara aktual dan kontekstual, agar mereka dapat mempertahankan argumentasinya secara logis, rasional, dengan bahasa yang komunikatif dan memikat perhatian pendengar (audiens). Fokus penguatan karakter berkomunikasi, percaya diri, dan mempengaruhi orang lain melalui tata cara berargumentasi yang baik.

5. Pendayagunaan Teknologi Informasi Komunikasi

Dalam pembelajaran, peserta didik dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Dengan memanfaatkan TIK diharapkan peserta didik mampu menguasai kompetensi dunia digital (Tim PPK Kemendikbud, 2017: 31).

F. Metode Internalisasi Pendidikan Karakter

Internalisasi nilai-nilai utama dalam gerakan

Penguatan Pendidikan Karakter harus dilakukan secara konsisten dan melibatkan pihak sekolah, orang tua, serta masyarakat. Di level kelas dan sekolah internalisasi nilai-nilai tersebut dapat dilakukan melalui pengintegrasian isi kurikulum, baik itu secara tematik maupun terintegrasi dalam per mata pelajaran. Diperlukan juga penguatan manajemen kelas, pilihan metodologi, dan evaluasi pengajaran oleh pendidik. Selain itu, perlu pengembangan muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan daerah yang memuat nilai-nilai utama pendidikan karakter. Sekolah pun perlu menekankan pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah. Hal yang paling penting dan utama adalah pendidik dan kepala sekolah harus menonjolkan keteladanan di lingkungan pendidikan.

Sementara itu penguatan pendidikan karakter di level masyarakat juga meliputi peran komite sekolah dan orang tua sebagai pemangku utama pendidikan peserta didik. Pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri juga mesti dilibatkan dalam proses internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter. Hal lain yang dapat dilakukan adalah mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, dan LSM. Terakhir adalah dengan mensinkronkan program dan kegiatan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga pemerintahan, dan masyarakat

pada umumnya, seperti melalui program magang (Tim PPK Kemendikbud, 2017: 15).

G. Indikator Pendidikan Karakter di Sekolah

Setelah keluarga, sekolah merupakan tempat yang kedua dalam proses internalisasi karakter peserta didik. Agar pendidikan karakter dapat berjalan dengan baik dan maksimal, maka pemahaman seluruh komponen sekolah tentang pendidikan karakter harus baik. Oleh karena itu, para pendidik atau guru harus menjalankan lima peran dalam pendidikan karakter di sekolah (Zubaidi, 2012) yaitu konservator (pemelihara) sistem nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan, innovator (pengembang) sistem nilai ilmu pengetahuan, transmit (penerus) sistem-sistem nilai ilmu ini kepada peserta didik, transformator (penerjemah) sistem-sistem nilai ini melalui penjelmaan dalam pribadi dan perilakunya.

Menurut Bennett, William, J., (1991), sekolah memiliki peran yang penting dalam pendidikan karakter anak didik, karena apa yang terekam dalam memori anak didik di sekolah, ternyata memiliki pengaruh begitu besar bagi kepribadiannya ketika dewasa kelak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sekolah merupakan salah satu wahana efektif internalisasi pendidikan karakter terhadap anak.

Sekolah sebagai lingkungan pembudayaan peserta

didik dan guru sebagai “perekayasa” kultur sekolah tidak terlepas dari regulasi, kebijakan, dan birokrasi. Kebijakan dan birokrasi harus ditata dan disiapkan untuk mendukung terwujudnya pendidikan karakter melalui pengembangan kultur pembelajaran dan sekolah sebagai ekologi perkembangan peserta didik. Menurut Kemendiknas (2010), pengembangan kurikulum pendidikan karakter itu pada prinsipnya tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan, tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Oleh karena itu, guru dan pemangku kebijakan pendidikan di sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter ke dalam kurikulum sekolah, silabus, dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang sudah ada.

Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter di sekolah adalah mengusahakan agar peserta didik itu mengenal dan menerima nilai-nilai karakter sebagai milik mereka, serta bertanggungjawab atas keputusan yang diambilnya, melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Melalui prinsip tersebut, peserta didik belajar melalui proses berfikir, bersikap, dan berbuat. Ketiga proses dalam pendidikan karakter tersebut, bertujuan untuk mengembangkan

kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan sosial, dan mendorong peserta didik untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk sosial.

Dalam memperjelas implementasi pendidikan karakter di sekolah, maka perlu diuraikan indikator keberhasilan sekolah dan kelas dalam pengembangan karakter peserta didik (Kemendiknas, 2010), yaitu sebagai berikut:

1. Religius

Karakter religious merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Adapun indikator budaya sekolah yaitu:

- a) Merayakan hari-hari besar keagamaan
- b) Memiliki fasilitas yang dapat digunakan untuk beribadah
- c) Memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk melaksanakan ibadah
- d) Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran
- e) Memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk melaksanakan ibadah.

2. Jujur

Karakter kejujuran merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Adapun indikator budaya sekolah yaitu:

- a) Menyediakan fasilitas tempat temuan barang yang hilang
- b) Transparansi laporan keuangan dan penilaian sekolah secara berkala
- c) Menyediakan kantin kejujuran
- d) Menyediakan kotak saran dan pengaduan
- e) Larangan membawa fasilitas komunikasi pada saat ulangan dan ujian
- f) Transparansi laporan keuangan dan penilaian kelas secara berkala
- g) Larangan menyontek

3. Toleransi

Karakter toleransi merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Adapun indikator dalam budaya sekolah yaitu:

- a) Menghargai dan memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga sekolah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial, status ekonomi, dan kemampuan khas.
- b) Memberikan perlakuan yang sama terhadap *stakeholder* tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial, dan status ekonomi.

4. Disiplin

Karakter merupakan tindakan yang menunjukkan

perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Adapun indikator dalam budaya sekolah yaitu:

- a) Memiliki catatan kehadiran.
- b) Memberikan penghargaan kepada warga sekolah yang disiplin.
- c) Memiliki tata tertib sekolah
- d) Membiasakan warga sekolah untuk berdisiplin
- e) Menegakkan aturan dengan memberikan sanksi secara adil bagi pelanggar tata tertib sekolah.
- f) Membiasakan hadir tepat waktu.
- g) Membiasakan mematuhi aturan.
- h) Menggunakan pakaian praktik sesuai dengan program studi keahliannya (5MK).

5. Kerja Keras

Karakter kerja keras merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar, tugas dan menyelesaikan tugas dengan sebaik baiknya. Adapun indikator dalam budaya sekolah, yaitu:

- a) Menciptakan suasana kompetisi yang sehat.
- b) Menciptakan suasana sekolah yang menantang dan memacu untuk bekerja keras.
- c) Memiliki pajangan tentang slogan atau motto tentang kerja
- d) Menciptakan kondisi etos kerja, pantang menyerah, dan daya tahan belajar.

- e) Menciptakan suasana belajar yang memacu daya tahan kerja.
- f) Memiliki pajangan tentang slogan atau motto tentang giat bekerja dan belajar.

6. Kreatif

Karakter kreatif merupakan sikap berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Adapun indikator dalam budaya sekolah yaitu:

- a) Menciptakan situasi yang menumbuhkan daya berpikir dan bertindak kreatif.
- b) Menciptakan situasi belajar yang bisa menumbuhkan daya pikir dan bertindak kreatif.
- c) Pemberian tugas yang menantang munculnya karya karya baru baik yang autentik maupun modifikasi.

7. Mandiri

Karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas. Adapun indikator dalam budaya sekolah yaitu:

- a) Menciptakan situasi sekolah yang membangun kemandirian peserta didik.
- b) Menciptakan suasana kelas yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkerja mandiri.

8. Demokratis

Karakter demokratis merupakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Adapun indikator dalam budaya sekolah yaitu:

- a) Melibatkan warga sekolah dalam setiap pengambilan keputusan.
- b) Menciptakan suasana sekolah yang menerima perbedaan.
- c) Pemilihan kepengurusan OSIS secara terbuka.
- d) Mengambil keputusan kelas secara bersama melalui musyawarah dan mufakat.
- e) Pemilihan kepengurusan kelas secara terbuka.
- f) Seluruh produk kebijakan melalui musyawarah dan mufakat.
- g) Mengimplementasikan model-model pembelajaran yang dialogis dan interaktif.

9. Rasa Ingin Tahu

Karakter rasa ingin tahu merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar. Adapun indikator dalam budaya sekolah yaitu:

- a) Menyediakan media komunikasi atau informasi (media cetak atau media elektronik) untuk berekspresi bagi warga sekolah.

- b) Memfasilitasi warga sekolah untuk bereksplorasi dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya.
- c) Menciptakan suasana kelas yang mengundang rasa ingin tahu.
- d) Eksplorasi lingkungan secara terprogram.
- e) Tersedia media komunikasi atau informasi (media cetak atau media elektronik).

10. Semangat Kebangsaan

Semangat kebangsaan merupakan cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Adapun indikator dalam budaya sekolah yaitu:

- a) Melakukan upacara rutin sekolah.
- b) Melakukan upacara hari-hari besar nasional.
- c) Menyelenggarakan peringatan hari kepahlawanan nasional.
- d) Memiliki program melakukan kunjungan ke tempat bersejarah.
- e) Mengikuti lomba pada hari besar nasional.
- f) Bekerja sama dengan teman sekelas yang berbeda suku, etnis, status sosial-ekonomi.
- g) Mendiskusikan hari-hari besar nasional.

11. Cinta Tanah Air

Cinta tanah air merupakan cara berpikir, bersikap, dan

berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan.

Adapun indikator dalam budaya sekolah yaitu:

- a) Menggunakan produk buatan dalam negeri.
- b) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- c) Memajangkan: Foto presiden dan wakil presiden, bendera negara, lambing negara, peta Indonesia, gambar kehidupan masyarakat fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa.
- d) Menyediakan informasi (dari sumber cetak, elektronik) tentang kekayaan alam dan budaya Indonesia.

12. Menghargai Prestasi

Menghargai prestasi merupakan sikap yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui, dan menghormati keberhasilan orang lain. Adapun indikator dalam budaya sekolah yaitu:

- a) Memberikan penghargaan atas hasil prestasi kepada warga sekolah.
- b) Memajang tanda-tanda penghargaan prestasi.
- c) Memberikan penghargaan atas hasil karya peserta didik.
- d) Memajang tanda-tanda penghargaan prestasi.
- e) Menciptakan suasana pembelajaran untuk

memotivasi peserta didik berprestasi.

13. Bersahabat/Komunikatif

Bersahabat atau komunikatif merupakan tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Adapun indikator dalam budaya sekolah yaitu:

- a) Suasana sekolah yang memudahkan terjadinya interaksi antar warga sekolah.
- b) Berkomunikasi dengan bahasa yang santun.
- c) Saling menghargai dan menjaga kehormatan.
- d) Pergaulan dengan cinta kasih dan rela berkorban.
- e) Guru mendengarkan keluhan-keluhan peserta didik.
- f) Dalam berkomunikasi, guru tidak menjaga jarak dengan peserta didik.

14. Cinta Damai

Cinta damai merupakan sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Adapun indikator dalam budaya sekolah yaitu:

- a) Menciptakan suasana sekolah dan bekerja yang nyaman, tenteram, dan harmonis.
- b) Membiasakan perilaku warga sekolah yang anti kekerasan.
- c) Membiasakan perilaku warga sekolah yang tidak bias gender.

- d) Perilaku seluruh warga sekolah yang penuh kasih sayang.
- e) Menciptakan suasana kelas yang damai.
- f) Kekkerabatan di kelas yang penuh kasih sayang.

15. Gemar Membaca

Gemar membaca merupakan kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Adapun indikator dalam budaya sekolah yaitu:

- a) Program wajib membaca.
- b) Frekuensi unjungan perpustakaan.
- c) Menyediakan fasilitas dan suasana menyenangkan untuk membaca.
- d) Daftar buku atau tulisan yang dibaca peserta didik.
- e) Saling tukar bacaan.
- f) Pembelajaran yang memotivasi anak menemukan referensi.

16. Peduli Lingkungan

Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Adapun indikator dalam budaya sekolah yaitu:

- a) Pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah.
- b) Tersedia tempat pembuangan sampah dan tempat

cuci tangan.

- c) Menyediakan kamar mandi dan air bersih. Pembiasaan hemat energi.
- d) Membuat biopori di area sekolah.
- e) Membangun saluran pembuangan air limbah dengan baik.
- f) Melakukan pembiasaan memisahkan jenis sampah organik dan anorganik.
- g) Penugasan pembuatan kompos dari sampah organik.
- h) Penanganan limbah hasil praktik.
- i) Menyediakan peralatan kebersihan.
- j) Memprogramkan cinta bersih lingkungan
- k) Memelihara lingkungan kelas.
- l) Tersedia tempat pembuangan sampah di dalam kelas.
- m) Pembiasaan hemat energi.
- n) Memasang stiker perintah mematikan lampu dan menutup kran air pada setiap ruangan apabila selesai digunakan.

17. Peduli Sosial

Peduli sosial merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Adapun indikator dalam budaya sekolah yaitu:

- a) Memfasilitasi kegiatan bersifat sosial.

- b) Melakukan aksi sosial.
- c) Menyediakan fasilitas untuk menyumbang.
- d) Berempati kepada sesama teman kelas.
- e) Membangun kerukunan warga kelas.

18. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun indikator dalam budaya sekolah yaitu:

- a) Membuat laporan setiap kegiatan yang dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis
- b) Melakukan tugas tanpa disuruh.
- c) Menunjukkan prakarsa untuk mengatasi masalah dalam lingkup terdekat.
- d) Pelaksanaan tugas piket secara teratur.
- e) Peran serta aktif dalam kegiatan sekolah. Mengajukan usul pemecahan masalah.

H. Penilaian Pendidikan Karakter

Penilaian menurut Gardner (2003: 252) menetapkan penilaian sebagai memperoleh informasi mengenai keterampilan dan potensi dari individu, dengan dua sasaran yaitu memberi umpan balik yang bermanfaat kepada masyarakat yang ada di sekitarnya.

Penilaian adalah proses yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik. Hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses pembelajaran (BNSP, 2006: 5).

Penilaian pendidikan karakter dilakukan untuk mengukur seberapa jauh nilai-nilai pendidikan karakter telah dipahami, dihayati, dan diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari, sekurang-kurangnya dapat terlihat di lingkungan sekolah. Penilaian pendidikan karakter dapat berbentuk penilaian perilaku, baik individu maupun kelompok. Penilaian dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang penghayatan nilai-nilai pendidikan karakter yang tercermin dalam kualitas hidup sehari-hari.

Dalam penilaian pendidikan karakter yang paling utama ialah individu itu sendiri, sebab sebagai usaha sadar, proses pendidikan mengandaikan adanya sikap reflektif dalam diri individu dalam menilai menerapkan perkembangan dan pertumbuhan karakternya sendiri. Namun, penilaian pendidikan karakter harus menyertakan penilaian dari pihak-pihak lain sebagai bagian integral pendidikan sebagai proses objektivitas. Penyertaan akan kehadiran orang lain adalah untuk menghindarkan pendekatan dan penilaian yang subyektif yang bisa terjadi dalam diri individu (Doni Koesoma, 2007: 280).

Sementara itu, komunitas menilai sejauh mana struktur yang ada dalam moral tiap individu yang bekerja dalam sistem tersebut. Yang pertama berkaitan dengan relasi intrapersonal, sedangkan yang lain lebih interpersonal yang tata acuannya adalah komitmen bersama dalam komunitas.

Penilaian pendidikan karakter pada hakikatnya adalah evaluasi atas proses pembelajaran secara terus menerus dari individu untuk menghayati peran dan kebebasannya bersama orang lain dalam sebuah lingkungan sekolah demi pertumbuhan integritas moralnya sebagai manusia.

Keberhasilan pendidikan karakter tidak akan dapat diukur jika subjek yang mengukur adalah pribadi lain di luar diri individu, sebab kondisi structural antropologis mereka tidak memungkinkan menilai penghayatan moral yang dilakukan oleh orang lain. Penilaian pendidikan karakter berkaitan erat dengan adanya unsur pemahaman, motivasi, kehendak, dan praktis dari individu. Pendidikan karakter menjadi semakin bertumbuh ketika motivasi dalam moralnya dalam kebersamaan dengan orang lain.

Dari hakikat pendidikan karakter, kita dapat menyimpulkan tentang tujuan penilaian pendidikan karakter. Penilaian pendidikan karakter dalam lembaga sekolah bukanlah terutama untuk menentukan kelulusan siswa. Namun, lebih sebagai penentu apakah kita sebagai

individu yang hidup dalam lembaga pendidikan mau mengembangkan daya-daya reflektif yang ada dalam diri tiap individu sehingga hidup tetap dalam kebersamaan dengan orang lain menjadi semakin bermutu. Untuk itu, penilaian pendidikan karakter semestinya mengevaluasi dan menelaah berbagai macam corak relasional antar individu di dalam lembaga pendidikan, hubungan antar siswa dengan siswa lainnya, siswa dengan guru, orang tua dengan sekolah, sekolah dengan masyarakat dan Negara.

Santrock (2008: 570-571) menyebutkan tipe-tipe atau kriteria pembelajaran yang perlu dimiliki, yaitu:

1. Pengetahuan, melibatkan apa yang perlu diketahui murid untuk memecahkan masalah dan menerapkan keahlian.
2. Penalaran/pikiran, salah satu tujuan pembelajaran adalah murid bukan hanya mendapatkan pengetahuan, akan tetapi juga mampu berfikir tentang pengetahuan.
3. Produk adalah contoh dari hasil kerja murid. Esai, paper, laporan sains merefleksikan kemampuan murid untuk menggunakan pengetahuan dan penalaran.
4. Perasaan. Target afektif adalah emosi, perasaan, dan nilai-nilai murid. Misalnya mendeskripsikan arti penting dari upaya membantu murid untuk mengembangkan kesadaran emosiona sendiri

(seperti memahami penyebab perasaan mereka), mengelola emosi (seperti menahan amarah), membaca emosi (seperti menjadi pendengar yang baik), dan mengelola hubungan (seperti kompeten dalam memecahkan problem hubungan).

Menurut Doni Koesoma (2007: 282) yang dinilai dalam pendidikan karakter adalah perilaku dan tindakan, bukan pengertian, pengetahuan, kata-kata yang diucapkan. Ketika suatu ucapan baru sebatas pemahaman dan pengertian, belum sampai pada tindakan, atau aktualisasi nilai tersebut, kata-kata itu belum menjadi objek penilaian bagi pendidikan karakter semestinya mengarah pada bagaimana perilaku merefleksikan perubahan dan keputusannya dalam kaitannya dengan perkembangan diri sendiri dan orang lain.

Kejujuran adalah prinsip penting bagi penilaian pendidikan karakter. Kejujuran membuat individu mampu semakin maju dalam penyempurnaan dirinya sebagai manusia berkarakter. Kejujuran dan keterbukaan akan tampil dalam kesediaan untuk ketebukaan akan tampil dalam kesediaan untuk mendengarkan pendapat orang lain dalam menilai dirinya. Individu yang memiliki karakter bagi dirinya sendiri akan dengan mudah menerima masukan dari orang lain. Dengan demikian, ia juga semakin dapat mengembangkan dirinya.

Secara praktis ada hal-hal yang memang secara

objektif bisa dipakai sebagai kriteria untuk menilai apakah pendidikan karakter telah berhasil dilaksanakan atau tidak. Objektif maksudnya ialah data-data dan fakta-fakta, entah berupa tindakan maupun dampak-dampak dari keputusan yang dapat diverifikasi oleh semua. Kriteria dan objek yang dibahas di sini hanya berkaitan dengan hal-hal yang bisa secara objektif dipakai sebagai pedoman penilaian pendidikan karakter di sekolah. Doni Koesoma (2007: 282-288) mengatakan bahwa dari data-data dan fakta, kita dapat melihat sejauh mana siswa dan individu di dalam melaksanakan pendidikan karakter, data dan fakta itu dapat berupa:

1. Sejauh mana individu di dalam suatu lembaga pendidikan melaksanakan nilai tanggung jawab bagi tugas-tugas mereka, kuantitas kehadiran adalah instrumen penting dalam penilaian terhadap tanggung jawab tersebut.
2. Penilaian pendidikan karakter juga bisa dilihat kedisiplinan siswa maupun komponen sekolah lainnya. Misalnya berapa siswa dari jumlah siswa yang secara tepat (disiplin) waktu menyerahkan tugas yang diembankan kepadanya.
3. Keberhasilan sekolah dalam pendidikan karakter adalah bagaimana meminimalisir kenakalan remaja seperti tawuran, minum minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya.

4. Pendidikan karakter yang berhasil akan menciptakan suasana yang baik bagi proses pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu kriteria objektif pendidikan karakter adalah prestasi akademis siswa.
5. Sejauh mana para siswa telah mempraktikkan nilai-nilai kejujuran. Nilai-nilai ini dapat dipantau dengan data-data tentang jumlah anak yang ketahuan menyontek.

Bagian II

Modal Sosial

sebagai Penguatan

Pendidikan Karakter

A. Pengertian Modal Sosial

Pengertian atas konsep modal sosial dapat ditelusuri mundur sampai ke pendiri ilmu sosiologi Emile Durkheim pada abad ke-19. Durkheim menyebut istilah “modal sosial” untuk menyatakan ikatan sosial antar manusia di dalam sebuah masyarakat yang membentuk kohesivitas sosial dalam mencapai tujuan bermasyarakat. Modal sosial merupakan sebuah kekuatan untuk mencapai tujuan hidup bersama yang tidak mungkin dicapai secara personal.

Misalnya saja dalam kegiatan pendidikan. Pendidikan merupakan aktivitas yang dilakukan antara pendidik, siswa, masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan tidak dapat diselenggarakan secara individual. Pendidikan memerlukan

kerjasama banyak pihak, mulai dari pemimpin sekolah, para guru, tenaga administrasi, murid, orang tua siswa, komite sekolah, dan tentu pemerintah. Jika semuanya elemen itu berfungsi sesuai tugas dan peran masing-masing, maka pendidikan akan berjalan baik dengan hasil yang baik pula.

Dalam hal ini, Emile Durkheim membayangkan sebuah tatanan masyarakat yang harmonis hanya bisa dicapai manakala antarwarga masyarakat itu saling berhubungan dengan baik melalui jaringan dan kesamaan nilai yang tumbuh di masyarakat itu dengan lebih mengedepankan persamaan daripada perbedaan. Nilai-nilai itu terus dijaga sebagai kekuatan yang mengikat, sehingga menjadi kekuatan tersendiri yang bermanfaat untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan (Dwiningrum, 2014: 212).

James Coleman juga berpandangan mirip dengan Durkheim. Menurutnya modal sosial itu inheren dalam struktur hubungan di antara individu dengan individu lain dan tidak berada dalam individu itu sendiri. Ia juga berpandangan bahwa modal sosial bersifat produktif, yaitu memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang tak mungkin tercapai tanpa adanya modal sosial (Coleman, 1990: 302).

Konsep modal sosial Coleman bertumpu pada harapan yang menjadi salah satu unsur terbentunya kepercayaan individu kepada lingkungan sosialnya. Dari situ kemudian

terbentuk suatu jaringan sosial (*social network*). Jaringan sosial adalah infrastruktur dinamis yang berwujud jaringan-jaringan kerja sama di antara individu. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Untuk menjaga jaringan sosial, maka diciptakan norma.

Norma yaitu aturan-aturan yang tidak tertulis namun dapat dipahami oleh seluruh anggota masyarakat sebagai pedoman atau penentu dalam berperilaku dalam konteks hubungan sosial sehingga terdapat sanksi yang diberikan bagi anggota masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Dengan demikian, menurut Coleman modal sosial utamanya terwujud dalam bentuk seperti kewajiban, harapan atau ekspektasi, dan sifat dapat dipercaya dari lingkungan sosial.

Robert D. Putnam mengembangkan konsep modal sosial dari Coleman dengan mengembangkan ide pokoknya tentang jaringan sosial, norma, dan kepercayaan. Sama seperti Durkheim dan Coleman, Putnam memandang modal sosial inheren dalam struktur hubungan antar individu. Modal sosial juga memungkinkan para individu untuk mencapai tujuan-tujuannya. Ia mengatakan “*by ‘Social capital’ I mean features of social life—networks, norms, and trust that enable participants to act together more effectively to pursue shared objectives* (Putnam, 1995: 665).”

Sementara itu Francis Fukuyama (2003) mengartikan modal sosial sebagai segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, dan di dalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi. Masyarakat senantiasa terikat pada nilai-nilai dan norma yang dijadikan pedoman bersikap, bertindak serta berhubungan dengan orang lain. Sikap-sikap itu seperti partisipatif, saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya (Dwiningrum, 2014: 167).

B. Dimensi Modal Sosial

Modal sosial memiliki beberapa dimensi, yaitu dimensi relasional, dimensi kognitif, dan dimensi struktural. Dimensi relasional adalah kepercayaan, identifikasi, dan kewajiban yang dibawa dalam hubungan antar individu atau organisasi. Dimensi kognitif adalah dimensi tentang kesamaan ambisi, visi, nilai, dan tujuan yang memungkinkan terjadinya kesamaan persepsi antar individu atau organisasi yang berhubungan dalam sistem sosial. Sedangkan dimensi struktural mengacu kepada konfigurasi kekuatan dan sumber daya yang ada dalam hubungan di antara individu atau organisasi (Nahapiet dan Ghoshal, 1998).

Biasanya dimensi relasional didahului oleh dimensi kognitif dan struktural. Hal itu karena dimensi kognitif yang berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan keyakinan

memengaruhi kepercayaan, solidaritas dan resiprositas yang mendorong ke arah terciptanya kerjasama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat yang kaya dengan nilai-nilai budaya sebagai modal sosial lebih memungkinkan untuk menjaga hubungan yang harmonis, baik sesama warga masyarakat secara internal maupun dengan orang-orang dari kelompok lainnya.

Modal sosial yang mengatur keharmonisan dan solidaritas hubungan internal sesama anggota kelompok disebut dengan istilah *bonding social capital* atau modal sosial pengikat, sedangkan modal sosial yang memungkinkan terciptanya kerjasama dan hubungan yang saling menguntungkan dengan warga dari kelompok lain disebut dengan istilah *bridging social capital* atau modal sosial jembatan. Disebut modal sosial jembatan karena menjembatani perbedaan-perbedaan yang terdapat antara kelompok masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda, dengan lebih mengutamakan persamaan yang terdapat pada kedua pihak.

Sementara itu, dimensi struktural yang biasanya berupa susunan, ruang lingkup organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat berfungsi memwadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat (Syahra, 2003: 9). Terpadunya dua dimensi itu pada gilirannya akan membentuk dimensi relasional modal sosial.

C. Indikator Modal Sosial

Indikator modal sosial berkisar pada tiga hal berikut, yaitu kepercayaan (*trust*), jaringan sosial (*social network*) dan norma (*norm*) (Rahmawati. dan Wahyudi, 2017: 4). Sama seperti pendapat Coleman, kepercayaan adalah harapan yang tumbuh dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur dan harapan. Dengan demikian, indikator bagi kepercayaan adalah perilaku jujur, perilaku teratur, dan harapan atau ekspektasi. Kepercayaan adalah unsur terpenting dari modal sosial, karena dengan kepercayaan orang dapat bekerjasama secara lebih efektif.

Jaringan sosial (*social network*) merupakan infrastruktur dinamis yang berwujud jaringan-jaringan kerjasama antar manusia. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerja sama. Indikator bagi jaringan sosial terdiri dari lima unsur, yaitu adanya partisipasi, pertukaran timbal balik, solidaritas, kerja sama dan keadilan.

Sementara itu, norma merupakan suatu aturan yang diharapkan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Norma terdiri dari pemahaman-pemahaman nilai moral dan peraturan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang Indikator bagi norma adalah pemahaman nilai-nilai, pelaksanaan peraturan, dan pemberlakuan sanksi (Rahmawati dan Wahyudi, 2017: 5).

D. Pengukuran Modal Sosial

Puslit KP2W Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran menyebut beberapa teknik dan pengukuran terhadap modal sosial. *Pertama* model dari Ony dan Bullen (1997) yang mengembangkan alat ukur praktis untuk mengukur modal sosial pada skala organisasi komunitas, serta dampaknya pada pengembangan partisipasi publik. Model ini menggunakan 8 (delapan) faktor sebagai indikator bagi modal sosial, yakni: (a) partisipasi di tingkat komunitas lokal; (b) aktivitas dalam konteks sosial; (c) perasaan kepercayaan dan keamanan; (d) koneksi dalam lingkungan ketetanggaan; (e) koneksi dengan keluarga dan teman-teman; (f) toleransi terhadap perbedaan; (g) nilai-nilai kehidupan; serta (h) koneksi dalam lingkungan pekerjaan.

Kedua, *Global Social Capital Survey*. Model ini dikembangkan oleh Deepa Narayan, dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator untuk mengukur ketersediaan modal sosial. Ketujuh indikator tersebut adalah: (a) karakteristik kelompok (meliputi jumlah keanggotaan; kontribusi dana; frekuensi partisipasi; partisipasi dalam pembuatan keputusan; heterogenitas keanggotaan; sumber pendanaan bagi organisasi); (b) norma-norma umum (meliputi kesediaan menolong orang lain; kepedulian pada orang lain; keterbukaan pada orang lain); (c) kebersamaan (meliputi seberapa jauh orang-orang dapat hidup bersama;

tingkat kebersamaan di antara orang-orang); (d) sosialitas keseharian; (e) hubungan ketetanggaan (meliputi kesediaan meminta tolong pada tetangga untuk merawat anak yang sakit; atau membantu diri sendiri yang sedang sakit); (f) voluntarisme (meliputi apakah pernah bekerja sebagai relawan; ekspektasi dari kegiatan sukarela; kritik terhadap mereka yang menolak bekerja sukarela; kontribusi pada lingkungan ketetanggaan; apakah pernah menolong orang lain); serta (g) kepercayaan (meliputi kepercayaan pada keluarga; pada tetangga; pada orang dari kelas yang berbeda; pada pemilik usaha; pada aparat pemerintah; pada penegak hukum, seperti jaksa, hakim, dan polisi; pada aparat pemerintah daerah).

Ketiga, Integrated Questionnaire for The Measurement of Social Capital (SC-IQ). Model ini dikembangkan oleh Christiaan Grootaert, Deepa Narayan, Veronica Nyhan Jones, dan Michael Woolcock (2004) dengan penekanan fokus pada negara-negara berkembang. Model ini bertujuan memperoleh data kuantitatif pada berbagai dimensi modal sosial dengan unit analisis pada tingkat rumah tangga. Pada model ini, digunakan 6 (enam) indikator, yakni: (a) kelompok dan jejaring kerja; (b) kepercayaan dan solidaritas; (c) aksi kolektif dan kerjasama (*cooperation*); (d) informasi dan komunikasi; (e) kohesi dan inklusivitas sosial; serta (f) pemberdayaan dan tindakan politik.

Berdasarkan model-model tersebut, model SCIQ

merupakan model yang merefleksikan dimensi struktural, kognitif, prosedural, dan *outcomes* dari modal sosial. Dimensi struktural berkaitan dengan keanggotaan dalam kelompok, dimensi kognitif berkaitan dengan persepsi tentang kepercayaan dan norma-norma. Dimensi prosedural tergambar dari indikator tentang aksi kolektif dan kerjasama, serta alur informasi dan komunikasi yang menunjukkan bagaimana modal sosial difungsikan. Dimensi *outcomes* dari modal sosial terkait dengan kohesivitas, inklusivitas sosial, pemberdayaan dan tindakan politik yang merupakan hasil atau dampak yang ditimbulkan dari modal sosial (Puslit KP2W Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, 2008: 16-18).

Namun sebagaimana Coleman mengartikan modal sosial sebagai seperangkat sumber daya yang juga berfungsi bagi perkembangan kognitif dan karakter generasi muda, hasil interpretasinya banyak digunakan di bidang penelitian pendidikan dalam kaitannya dengan modal sosial. Indikator-indikator seperti kepercayaan (*trust*), jaringan sosial, dan norma lazim digunakan sebagai indikator bagi pengukuran modal sosial dalam kaitannya dengan penelitian di bidang pendidikan (Rahmawati. dan Wahyudi, 2017: 4).

E. Modal Sosial dalam Implementasi Pendidikan Karakter

Sekolah sebagai lembaga pendidikan sangat

mebutuhkan modal sosial dalam proses pengelolaan pendidikan. Modal sosial berperan dalam proses pendidikan karakter dalam keluarga, sekolah dan masyarakat yang secara sinergis dapat dikuatkan untuk mengatasi krisis karakter bangsa. Selama ini masyarakat lebih mengenal modal fisik, seperti lahan, gedung-gedung dan peralatan, serta uang, atau tenaga manusia sebagai sarana bagi perbaikan kualitas sekolah dan pendidikan.

Di samping itu sebenarnya ada modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas sekolah dan pendidikan. Penguatan modal sosial diperlukan agar siswa mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Usaha membangun sekolah yang baik adalah sama dengan upaya membangun masyarakat yang baik (Dwiningrum, 2014: 163).

Terdapat kecenderungan bahwa sekolah terlalu mengejar capaian prestasi akademik untuk dapat dikatakan sebagai sekolah yang baik. Akan tetapi pendidik seharusnya tidak berpikir pragmatik, namun dibutuhkan pemikiran pendidikan yang berdimensi normatif, yaitu bagaimana pendidikan dapat mewujudkan nilai-nilai ideal bagi kehidupan individu dan sosial. Pencapaian prestasi keilmuan yang tinggi tanpa dilandasi kekuatan nilai kebaikan moral akan menghasilkan lulusan sekolah yang mudah terbawa pada tindakan tidak bermoral yang dapat merusak kehidupan di masyarakat (Dwiningrum, 2014: 163).

Thomas Lickona berpendapat bahwa kualitas karakter generasi muda dinilai memburuk. Hal itu ditandai oleh (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, (2) penggunaan balasa dan kata-kata yang memburuk, (3) pengaruh *peer group* yang kuat yang kuat dalam tindak kekerasan, (4) meningkatnya perilaku merusak diri (penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas), (5) semakin kaburnya pedoman moral dan buruk, (6) menurunnya etos kerja, (7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orangtua dan guru, (8) rendahnya rasa tanggung jawab individu, (9) membudayanya ketidakjujuran, dan (10) adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama (Dwiningrum, 2014: 233).

Peran pendidikan karakter diharapkan menjadi kekuatan untuk membangun kembali nilai-nilai sosial-budaya yang pada gilirannya juga akan meningkatkan modal sosial. Dwiningrum mengatakan pendidikan karakter harus dilakukan dengan pendekatan holistik dan kontekstual agar hasilnya maksimal sebab masalah krisis karakter bersifat struktural, maka pendidikan karakter harus dilakukan secara holistik dan kontekstual. Secara holistik artinya membangun karakter bangsa Indonesia dimulai dari keluarga, sekolah, masyarakat dan negara (Dwiningrum, 2014: 235).

Dalam pendidikan karakter, hasil belajar tidak boleh sekadar diukur dari hasil akademik atau lulus ujian akan tetapi perlu dikaitkan dengan modal sosial. Modal sosial ini

membuat anak tidak hanya mendapatkan ijazah tetapi juga perkembangan karakter. Prestasi siswa harus diukur dari segi pengembangan mental, fisik, moral, dan sosial.

Kristi Wardani dan Yohana Sumiyati juga menilai harus ada kerja sama yang lebih besar antara guru, sekolah, rumah dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Upaya mewujudkan kerja sama yang besar dari berbagai komponen tersebut perlu dibangun dan dijaga kelestariannya melalui salah satunya melalui pemanfaatan modal sosial. Struktur relasi membentuk jaringan sosial akan menciptakan berbagai ragam kualitas sosial berupa saling percaya, terbuka, dan kesatuan norma yang menetapkan sanksi-sanksi bagi anggotanya (Wardani dan Sumiyati, 2014: 225).

Proses pendidikan pada hakekatnya merupakan interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan orang tua, guru dengan orang tua dan masyarakat luas. Apa yang diperlukan adalah suasana pendidikan yang mendukung serta efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Modal sosial terdiri dari kepercayaan, kesepahaman serta pertukaran nilai dan perilaku yang membangun hubungan antara individu dan komunitas yang memungkinkan kerja sama saling menguntungkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan komitmen dari setiap individu untuk saling terbuka, percaya, dan memberikan kewenangan bagi setiap orang untuk berperan sesuai dengan tanggung

jawabnya (Wardani dan Sumiyati, 2014: 226)

Kegiatan pembelajaran dan pendidikan yang berlangsung di sekolah meliputi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang melibatkan ragam aspek perkembangan siswa, baik kognitif, konatif, afektif, maupun psikomotorik sebagai suatu keutuhan dalam konteks kehidupan sosial. Pendidikan karakter harus menyatu dalam proses pembelajaran yang mendidik, dikembangkan dalam suasana transaksional dan bukan intruksional, dan dilandasi pemahaman secara mendalam terhadap perkembangan siswa. Suasana pembelajaran ini akan menumbuhkan *nurturant effect* terhadap pembelajaran yang seiring dengan pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan dalam pembelajaran ini (Wardani dan Sumiyati, 2014: 226).

Pendidikan yang dibangun dengan memanfaatkan modal sosial (kepercayaan, jaringan sosial, dan norma) akan membuat pendidikan karakter lebih diarahkan pada sikap dan tindakan, bukan pada tataran pengetahuan belaka. Sebab, pendidikan di sekolah memiliki peran strategis untuk memanfaatkan modal sosial baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun mengevaluasi pendidikan karakter.

Jelas, tantangan abad 21 dalam bidang pendidikan terutama sekolah adalah mampu membekali siswa dari capaian kualitas akademik dan juga karakter. Kualitas karakter tersebut dapat dipupuk salah satunya dengan

pemanfaatan modal sosial seperti nilai kebersamaan, toleransi, solidaritas, menghargai, berempati, bekerja sama yang dibangun dan diwujudkan melalui kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Dengan demikian modal sosial yang diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dapat menjadi misi sekolah dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya (Wardani dan Sumiyati, 2014: 226).

Kristi Wardani dan Yohana Sumiyati juga merekomendasikan bagaimana mengimplementasikan modal sosial dalam pendidikan karakter di sekolah, yaitu dengan cara:

- 1) Kegiatan rutin, yaitu suatu kegiatan yang selalu dilakukan setiap hari di sekolah maupun di luar sekolah.
- 2) Kegiatan spontan, yaitu kegiatan yang dilakukan secara spontan pada saat itu juga.
- 3) Misalnya guru memberikan teguran kepada siswa yang terlihat melanggar atau
- 4) melakukan perbuatan yang jauh dari unsur-unsur nilai kebaikan.
- 5) Kegiatan teladan, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan memberikan teladan yang baik kepada siswa.
- 6) Kegiatan terprogram, yaitu kegiatan yang dalam pelaksanaannya terlebih dahulu diawali dengan

perencanaan atau program dari guru dalam kegiatan pembelajaran (perencanaan semester, satuan kegiatan mingguan dan satuan kegiatan harian).

Dengan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, maka modal sosial yang sudah ada maupun yang hendak dikembangkan pada diri siswa dapat dipupuk dan dilestarikan (Wardani dan Sumiyati, 2014: 227).

Bagian III

Media Sosial:

Sarana Penguatan Pendidikan Karakter

A. Definisi Media Sosial

Kaplan and Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten buatan pengguna (*user-generated content*)” (Kaplan dan Haenlein, 2010: 60). Ciri penting dari setiap situs media sosial adalah dimungkinkannya pembuatan konten oleh penggunanya melalui teknologi Web 2.0. Media sosial, dengan demikian berciri dinamis dan interaktif.

Dalam hal ini, media sosial berbeda dengan situs web dari jenis Web 1.0 yang berciri statis. Perbedaan esensial antara Web 1.0 dan Web 2.0 adalah seperti berikut.

Dalam Web 1.0 tidak semua orang dapat membuat konten dan kebanyakan pengakses situs web Web 1.0 hanyalah konsumen konten belaka, tetapi dalam Web 2.0 siapapun dapat menjadi pembuat konten (*content creator*) (Cormode dan Krishnamurthy, 2008: 2).

Media sosial juga berbeda dengan media tradisional. Media tradisional masih menggunakan media cetak dan media *broadcast*, sedangkan media sosial adalah media yang bekerja dengan menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan umpan balik secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas (Kaplan, 2010: 61).

Secara historis media sosial mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Sejarah media sosial diawali pada era 70-an, saat itu adalah pertama kalinya ditemukan sistem papan buletin yang memungkinkan satu sama lain untuk dapat saling berhubungan menggunakan surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak, semua ini dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem (Ayun, 2015: 5).

Pada tahun 1995 lahirlah situs *GeoCities*. *GeoCities* melayani *web hosting*. *GeoCities* merupakan tonggak awal berdirinya halaman web. Pada tahun 1997 sampai tahun

1999 munculah media sosial pertama yaitu *Sixdegree.com* dan *Classmates.com*. Pada tahun yang sama pula, muncul juga situs yang berguna untuk membuat blog pribadi yang bernama *Blogger*. Situs *Blogger* ini menawarkan penggunaannya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri, sehingga para pengguna dari *Blogger* ini bisa memuat tentang apapun di halaman pribadi mereka.

Pada tahun 2002 *Friendster* menjadi sosial media yang sangat *booming* dan kehadirannya sempat menjadi fenomenal. Setelah itu pada tahun 2003 sampai saat ini bermunculan berbagai sosial media dengan berbagai karakter dan kelebihan masing-masing, seperti *LinkedIn*, *MySpace*, *Facebook*, *Twitter*, *Wiser*, *Google+*, *Youtube*, *Instagram* dan lain sebagainya (Ayun, 2015: 7). Media sosial juga kini menjadi sarana atau aktivitas *digital marketing*, seperti *social media maintenance*, *social media endorsement* dan *social media activation*. Oleh karena itu, media sosial kini menjadi salah satu layanan yang ditawarkan oleh *digital agency* (Ayun, 2015: 8).

B. Manfaat Media Sosial

Secara umum media sosial dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan keterhubungan (*connectedness*) (Dijck, 2013: 4). Manfaatnya, dengan demikian, adalah untuk menghubungkan orang-orang. Media sosial berjenis situs jejaring sosial seperti *Facebook* dan *Twitter* dibuat

dengan alasan itu, maka bukan sebuah kebetulan lahirnya *Facebook* secara bersamaan juga melahirkan era media sosial dan Web 2.0. Media sosial berjenis situs jejaring sosial, seperti *Facebook*, *Instagram* dan *Twitter*, memiliki manfaat untuk membuat halaman web pribadi dan menghubungkan antar sesama pengguna untuk berbagi informasi dan berkomunikasi.

Selama hampir 20 tahun terakhir, media sosial telah merembes masuk ke dalam sendi kehidupan masyarakat. Para remaja dan orang dewasa, misalnya, tak dapat membayangkan bagaimana mengorganisir kehidupan sosialnya tanpa *Facebook* atau memperoleh *breaking news* dan informasi termutakhir tentang suatu hal tanpa *Twitter*. Orang-orang, misalnya, tak dapat mengekspresikan diri dan momen yang secara visual lebih baik tanpa adanya *Instagram*. Para pekerja kreatif sudah tentu akan kehilangan banyak kesempatan besar jika mengabaikan kekuatan dari *Youtube*. Media sosial memang memberi banyak manfaat. Apalagi setiap platform pada akhirnya ikut mengembangkan fitur-fitur utama yang dimiliki oleh media sosial lainnya. Orang dapat menjadi dan semakin terhubung.

C. Macam-Macam Media Sosial

Jose van Dijck mengatakan situs-situs media sosial setidaknya dapat dibagi menjadi tiga jenis (Dijck,

2013: 8). *Pertama*, dan yang paling utama, adalah situs jejaring sosial (*social network sites*). Situs-situs jenis ini mempromosikan kontak interpersonal, baik milik individu maupun sebuah kelompok, dengan tujuan membangun hubungan personal atau profesional. Contoh utama situs jenis ini adalah *Facebook*, *Twitter* dan *LinkedIn*.

Kedua adalah situs yang fokus pada konten buatan pengguna. Situs-situs jenis ini mendukung kreativitas dan mempromosikan konten yang dibuat oleh seorang amatiran maupun profesional. Contoh utama situs jenis ini adalah *Youtube*, *Instagram*, *Flickr*, *Myspace*, dan *Deviantart*.

Ketiga adalah situs perniagaan. Situs-situs jenis ini berfokus pada aktivitas jual-beli produk. *Amazon* dan *Ebay* adalah contoh utama dari situs jenis ini. Selain itu ada pula contoh lainnya yaitu *Shopee*, *Tokopedia*, *Bukalapak*, dan lain sebagainya.

Jose van Dijck mengatakan pembagian tersebut sebenarnya tidak terlalu tegas. Beberapa situs media sosial pada akhirnya saling mengembangkan fitur-fitur yang dimiliki oleh situs media sosial lainnya. Selain itu, situs-situs *blog* seperti *Tumblr*, *Wordpress*, dan *Blogger*, juga termasuk dalam jenis situs media sosial. Ada pula beberapa situs media sosial yang berfokus pada permainan daring (*game online*). Pembagian oleh van Dijck pada dasarnya dibuat berdasarkan platform yang

dimiliki oleh media sosial yang bersangkutan. Selain itu, menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial (Kaplan dan Haenlein, 2010: 60), yaitu:

- 1) Proyek Kolaborasi, yaitu *website* memungkinkan penggunanya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun menghapus konten-konten yang ada di *website* ini. Contohnya adalah *Wikipedia*.
- 2) *Blog* dan *Microblog*, yaitu *website* yang membebaskan penggunanya dalam mengekspresikan sesuatu di *blog* ini seperti curhat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. Contohnya adalah *Twitter*.
- 3) Konten, yaitu *website* yang penggunanya saling menyebarkan hal-hal yang ada di media baik seperti video, *e-book*, gambar, dan lain-lain. Contohnya adalah *Youtube*.
- 4) Situs Jejaring Sosial, yaitu sebuah aplikasi yang mengizinkan penggunanya untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto. Contohnya adalah *Facebook* dan *Instagram*.
- 5) *Virtual Game World*, yaitu sebuah dunia virtual di mana lingkungan 3D direplika, sehingga pengguna bisa muncul dalam bentuk *avatar-avatars* yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya adalah *game online*.

D. Peran Media Sosial di Masa Pandemi

Virus corona baru atau SARS-Cov-2 sampai saat ini telah menginfeksi jutaan orang di dunia. Penyakit virus korona 2019 atau *coronavirus disease 2019* (COVID-19) juga telah ditetapkan sebagai pandemi bernama *COVID-19 Pandemic* oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sejak Maret tahun 2020 lalu. Sejak saat itu, pemerintah, peneliti kesehatan, dan pemangku jabatan lainnya di berbagai dunia terus berupaya mengatasi pandemi ini.

Berbagai kebijakan mulai diterapkan, seperti penguncian wilayah (*lockdown*), pemberlakuan kerja dari rumah (*work from home*), pembatasan jam operasional usaha, sekolah daring, pembatasan jarak (*physical distancing*) hingga anjuran memakai masker dan mencuci tangan (protokol kesehatan). Kehidupan dengan kebiasaan-kebiasaan baru (*new normal*) tersebut pun berangsur-angsur disosialisasikan dan diterapkan. Belakangan program vaksinasi juga telah bergulir di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Reaksi awal masyarakat awam terhadap kehadiran virus corona jenis baru ini adalah mencari dan mengumpulkan berbagai informasi tentangnya. Informasi tersebut bisa diperoleh dari televisi, radio, koran, dan otoritas di lingkungan sekitar. Namun sumber-sumber informasi tersebut kerap kali terhambat oleh persoalan

kemutakhiran informasi.

Persoalan kemutakhiran informasi ini dapat diatasi melalui media sosial. Qilin Tang, Kai Zhang dan Yan Li mengatakan bahwa peran pertama dan utama dari media sosial pada masa pandemi adalah untuk menyebarkan (*dissemination*) informasi (Tang, Zhang, dan Li, 2020: 1). Namun informasi yang disebarkan bukanlah sembarang informasi. Informasi yang disebarkan harus yang dapat dipercaya dan diandalkan (*reliable*). Qilin Tang, Kai Zhang dan Yan Li pun mengatakan media sosial memiliki dua peran penting selama masa pandemi. Pertama, menyebarkan informasi yang dapat dipercaya dan diandalkan (*reliable*). Kedua, memberantas informasi-informasi yang menyesatkan (*misinformation*) dan informasi palsu (*hoax*) (Tang, Zhang, dan Li, 2020: 1). Sebagaimana WHO mengatakan bahwa semua pihak bukan saja sedang berusaha melawan *pandemic* tetapi juga *infodemic* (Ferreira dan Borges, 2020: 109).

Media sosial dapat membantu pemerintah dan pemangku jabatan lainnya dalam menyebarkan informasi-informasi terbaru tentang virus korona dan penyakit virus korona, panduan-panduan yang harus dilakukan untuk mencegah masyarakat agar terhindar dari infeksi virus korona atau bagaimana merawat dan memulihkan jika seseorang terinfeksi virus korona. Media sosial juga dapat membantu pemerintah untuk menyebarkan informasi-

informasi tentang layanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat dan prosedur pelayanannya.

Selain itu media sosial juga dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk menyebarkan informasi tentang hambatan, keluhan atau laporan atas penanganan pandemi di lingkungan dan layanan kesehatan. Namun yang tidak kalah penting adalah memberantas informasi-informasi menyesatkan dan informasi palsu tentang pandemi korona ini. Hal tersebut dapat dilakukan baik oleh pemerintah atau masyarakat itu sendiri melalui media sosial. Berkat media sosial semuanya dapat dilakukan secara serempak, langsung, dan mutakhir.

Selain berperan untuk menyebar informasi yang *reliable* dan memberantas *misinformation* serta *hoax*, media sosial juga dapat berperan dalam menunjang perekonomian. Aktivitas perniagaan, jual-beli produk, atau ekonomi digital secara umum, dapat secara dilakukan secara efektif lewat media sosial.

Di ranah ini media sosial berperan sebagai tempat pemasaran produk (*marketplace*) dan *digital branding*. Sebagai tempat pemasaran produk, para pelaku bisnis tetap dapat mengoptimalkan pemasaran produknya melalui fitur-fitur yang disediakan oleh media sosial, terutama *Facebook* dan *Instagram*. Sebagai tempat bagi *digital branding*, para pelaku bisnis dapat memanfaatkan fitur-fitur media sosial untuk menayangkan komentar-

komentar atau testimoni-testimoni dari pelanggan mengenai kualitas produknya (Hadiwinata, Mundzir, dan Muslim, 2020: 65-66). Dengan demikian roda perekonomian dapat terus berjalan meski dalam situasi pandemi.

E. Media Sosial dalam Penguatan

Pendidikan Karakter

Era revolusi industri 4.0 telah memengaruhi dunia pendidikan konvensional yang selama ini mengandalkan sistem tatap-muka dalam pembelajaran. Media sosial dan aplikasi-aplikasi pembelajaran di luar kelas memungkinkan peserta didik untuk belajar sendiri, berkelompok, dan berkolaborasi dengan teman hingga membuat komunitas atau kelompok belajar. Media sosial dan aplikasi pembelajaran daring memiliki keunggulan dalam hal kemudahan akses dan biaya yang murah dibandingkan dengan sekolah, tempat les atau bimbingan belajar.

Melalui media sosial dan aplikasi pembelajaran daring dengan segenap fitur-fiturnya yang interaktif membuat model pembelajaran tatap-muka, metode ceramah pendidik, sampai diskusi dan presentasi dalam kelas bisa menjadi tampak membosankan. Terlebih mulai ada kecenderungan dari para peserta didik yang lebih mudah memahami sesuatu apabila materi belajar atau teori itu

disampaikan secara audio-visual.

Fitur di media sosial dan aplikasi pembelajaran daring juga memungkinkan materi pelajaran itu tersimpan dan dapat terus-menerus dilakukan pengulangan apabila peserta didik belum memahaminya (Wijaya dan Tulak, 2019: 1). Oleh karena itu keberadaan dan manfaat media sosial dan aplikasi pembelajaran daring tidak dapat diabaikan begitu saja, mengingat penggunaannya sebagai sarana untuk belajar dan proses pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas, telah menjadi tren bagi generasi Z.

Berikut adalah beberapa manfaat media sosial dan aplikasi pembelajaran daring dalam dunia pendidikan.

- 1) Media sosial dan aplikasi pembelajaran daring memiliki potensi untuk meningkatkan pembelajaran siswa, memfasilitasi interaksi pendidik dan interaksi peserta didik, pengembangan keterampilan dan tingkat kepuasan dengan keterlibatan pembelajaran *mobile* yang sama sekali baru.
- 2) Media sosial dan aplikasi pembelajaran daring mendukung optimalisasi sensasi yang diterima oleh indra mata, telinga, dan indra lainnya selama proses belajar. Media sosial hadir untuk memberi penguatan sensasi, dan cara belajar yang kreatif melalui audio-visual yang berbunyi, terlihat, dan bersuara.

- 3) Media sosial dan aplikasi pembelajaran daring dapat menjadi *platform* yang tepat untuk menjembatani kesenjangan mutu antara daerah yang pendidikannya sudah maju dengan daerah yang pendidikannya masih berkembang.
- 4) Media sosial dan aplikasi pembelajaran daring dapat membantu meningkatkan kinerja akademik antara peserta didik, pendidik, praktisi pendidikan, dan pengawas dengan mengintegrasikan media sosial dalam metode pembelajaran.
- 5) Media sosial dan aplikasi pembelajaran daring dapat memfasilitasi pembelajaran kolaboratif yang melibatkan peserta didik, pendidik, praktisi pendidikan, dan pengawas dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan (Wijaya dan Tulak, 2019: 3)

Dalam kaitannya dengan pendidikan karakter, media sosial dan aplikasi pembelajaran daring dapat dimanfaatkan untuk membagikan nilai-nilai karakter dengan mengintegrasikannya ke dalam model pembelajaran. Substansi pesan (*content*) tentang nilai-nilai utama dari pendidikan karakter dapat disisipkan, ditanamkan, dan dibagikan dengan bantuan media sosial dan aplikasi pembelajaran daring.

Selain itu, pembelajaran mandiri dan berkelompok berbasis media sosial dan aplikasi pembelajaran daring

juga memungkinkan karakter peserta didik terasah, terutama berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan teknis dan sosial yang dibutuhkan dalam menghadapi era digital sekarang ini. Keterampilan komunikasi dan kreativitas peserta didik juga terasah melalui media pembelajaran baru ini.

Media sosial dan aplikasi pembelajaran daring juga dapat memberikan motivasi belajar peserta didik, selain karena fitur-fitur dan konten-konten interaktif yang dimilikinya, juga karena popularitas media sosial dan aplikasi pembelajaran daring yang luas. Peserta didik berkesempatan bertemu dengan peserta didik seusia dan memungkinkan pembuatan kelompok studi daring, mendorong keberanian mengajukan ide serta berbagi dan mempromosikannya lewat media sosial. Dalam hal kesempatan bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dan 'isi kepala' yang berbeda-beda inilah karakter peserta didik terasah karena menghasilkan pemahaman terhadap adanya kemajemukan sehingga melahirkan penghargaan terhadap keragaman budaya.

Secara umum, manfaat media sosial dan aplikasi pembelajaran daring bagi pendidikan karakter adalah seperti berikut.

- 1) Mendorong aktualisasi diri peserta didik yang memiliki karakter yang beragam dalam kelompok

- belajar berbasis media sosial.
- 2) Memotivasi diri untuk belajar dan mengembangkan keterampilan kolaboratif bersama teman kelompok dan teman sebaya melalui media sosial yang mencerminkan karakter bangsa.
 - 3) Berbagi ilmu pengetahuan melalui kerja sama, kreativitas dan inovasi dalam media sosial.
 - 4) Berbagi pengalaman dalam kelompok dan teman sebaya dengan cara menggali potensi diri dengan teman sebaya untuk meningkatkan kerja keras, kerja sama, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kejujuran
 - 5) Membina hubungan dengan orang lain yang berbeda dalam komunitas media sosial untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan karakter (Wijaya dan Tulak, 2019: 8).

Selain itu, agar dalam memanfaatkan media sosial secara proporsional maka dibutuhkan beberapa faktor dalam mengaturnya. Pembatasan yang dilakukan antara lain: 1) terjadwal, yakni penggunaan media sosial (hiburan, edukasi, komunikasi) harus terjadwal dan disepakati bersama. Apabila penggunaan media sosial berlebihan dan condong pada salah satu fiturnya (seperti hiburan), maka akan menimbulkan efek negatif seperti ketergantungan/kecanduan; 2) pengkajian akun media sosial. Kepemilikan akun media sosial oleh siswa

harus dikaji dulu tingkat kebermanfaatannya. Apabila untuk mencari inspirasi dan ilmu pengetahuan, tentu diperbolehkan. Namun, jika hanya sekadar untuk bermain dan hiburan, seyogyanya tidak diperbolehkan.

Langkah pembatasan selanjutnya dengan melakukan pengecekan riwayat pencarian. Orang tua bertanggung jawab dalam mengecek riwayat pencarian media sosial anak. Pengecekan riwayat harus dilakukan secara kontinu setiap harinya. Meski hal ini masih punya kelemahan, misalnya riwayat bisa dihapus oleh anak secara satu per satu atau semuanya. Tidak berhenti pada pengecekan riwayat, tetapi perlu dilakukan pemblokiran atau pembatasan konten jika dibutuhkan. Hal itu berlaku pada konten di media sosial yang tidak sesuai dengan usia siswa.

Kemudian langkah selanjutnya menjelaskan kepada anak bahwa edukasi media sosial bukan jalan pintas. Mesin pencari di media sosial memang canggih dan mampu menjawab persoalan apa pun, namun tetap harus ada pembatasan. Hal ini bertujuan agar siswa tidak memiliki sifat ketergantungan ketika sedang mengerjakan tugas/soal atau mencari materi ilmu pengetahuan. Sebisa mungkin siswa diarahkan untuk membaca buku terlebih dahulu, dan mesin pencari media sosial hanya sebagai penunjang, yaitu mengomparasi dan mengombinasi ilmu pengetahuan dari buku dan media sosial.

Terakhir adalah melakukan pembatasan pada media sosial sebagai komunikasi bagi anak. Perlu dijelaskan kepada anak bahwa media sosial memang memiliki peran komunikasi yang sangat bermanfaat untuk menjalin relasi dan sosialisasi kepada orang lain. Namun anak harus diajarkan lebih selektif dalam memilih teman interaksinya. Karena, apabila tidak ada pengawasan lebih, maka komunikasi akan dimanfaatkan untuk membicarakan hal-hal yang tidak ada kaitannya dalam pendidikan (Amaruddin, Atmaja, dan Khafid, 2020: 42-43).

Bagian IV

Pendidikan Multikultural dalam Dimensi Pendidikan Karakter

A. Pendidikan dalam Kerangka Kebudayaan

Pendidikan dalam kerangka kebudayaan dapat diartikan bahwa pendidikan merupakan kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan, karena pendidikan adalah upaya memberikan pengetahuan dasar sebagai bekal hidup. Koentjaraningrat mengklasifikasikan kebudayaan dalam tiga bentuk, yaitu: 1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya. 2) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. 3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (Normina, 2017: 20).

Sebagai bagian dari totalitas nilai, sikap, perilaku dan produk kebudayaan, pendidikan harus dimaknai sebagai pembentukan karakter (*character building*) manusia, yaitu proses membudayakan manusia. Melalui pewarisan kebudayaan dan internalisasi pada setiap individu, pendidikan hadir dalam bentuk sosialisasi kebudayaan, berinteraksi dengan nilai-nilai masyarakat setempat dan memelihara hubungan timbal balik yang menentukan proses-proses perubahan tatanan sosio-kultur masyarakat dalam rangka mengembangkan kemajuan peradabannya (Normina, 2017: 22).

Pendidikan dalam kerangka kebudayaan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Memperkenalkan, memelihara dan mengembangkan unsur-unsur budaya.
- 2) Pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik yang mencerminkan budaya bangsa.
- 3) Penyaringan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sendiri.

Sementara itu, pendidikan dalam kerangka kebudayaan memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan potensi karakter peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya bangsa.

- 2) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang sejalan dengan nilai-nilai dan tradisi budaya bangsa.
- 3) Menanamkan jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab bagi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa yang berbudaya.
- 4) Menanamkan rasa bangga atas budaya bangsa sendiri.
- 5) Mengembangkan lingkungan pendidikan sebagai lingkungan belajar yang aman dan toleran.

Nilai-nilai yang dikembangkan pendidikan dalam kerangka kebudayaan dapat diperoleh dari sumber-sumber berikut.

- 1) Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang juga berasal dari agama.
- 2) Pancasila: Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan di atas dasar negara yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945.

- 3) Budaya: masyarakat Indonesia memiliki budaya yang beragaman. Puncak-puncak kebudayaan yang ada di nusantara dapat digali nilai-nilai budayanya dan dijadikan dasar bagi pendidikan dalam kerangka kebudayaan (Normina, 2017: 25).

B. Definisi Pendidikan Multikultural

Secara *de facto* Indonesia adalah negara yang memiliki banyak perbedaan dan keanekaragaman. Indonesia mempunyai 600-an bahasa daerah, 300-an suku bangsa yang hidup di lebih-kurang 17 ribu kepulauan Nusantara. Namun secara *de jure*, Indonesia merupakan negara kesatuan.

Komitmen Indonesia terhadap persatuan tercermin dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” dan dasar negara Pancasila. Adapun komitmen terhadap persatuan tersebut tidak dimaksudkan untuk melakukan penyeragaman terhadap perbedaan dan keanekaragaman yang ada. Indonesia tetap menjunjung dan menghargai keunikan dari keanekaragaman yang dimilikinya. Keanekaragaman dan perbedaan yang dimiliki Indonesia adalah anugerah sekaligus tantangan yang harus disikapi dengan bijak oleh segenap warga Indonesia.

Konsekuensi adanya perbedaan dan keanekaragaman tersebut adalah beragamnya pola pikir, perilaku dan karakter pribadi setiap insan Indonesia. Tradisi yang

terbentuk di setiap daerah akan berlainan antara satu suku/daerah dengan suku/daerah yang lain. Pergumulan antar budaya memiliki peluang konflik apabila tidak terjadi saling memahami dan menghormati satu sama lain. Proses untuk meminimalisir konflik ini memerlukan upaya pendidikan yang berwawasan multikultural dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang majemuk dan heterogen agar saling memahami dan menghormati serta membentuk karakter yang terbuka terhadap perbedaan dan keanekaragaman (Ibrahim, 2013: 132).

Indonesia memiliki falsafah berbeda suku, etnik, bahasa, agama dan budaya, tapi memiliki satu tujuan, yakni terwujudnya bangsa Indonesia yang kuat, kokoh, memiliki identitas yang kuat, dihargai oleh bangsa lain, sehingga tercapai cita-cita ideal dari pendiri bangsa sebagai bangsa yang maju, adil, makmur dan sejahtera. Untuk itu, seluruh komponen bangsa tanpa membedakan etnik, ras, agama dan budaya, seluruhnya harus bersatu pada, membangun kekuatan di seluruh sektor, sehingga tercapai kemakmuran bersama, memiliki harga diri bangsa yang tinggi dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh sebab itu, mereka harus saling menghargai satu sama lain, menghilangkan sekat-sekat agama dan budaya (Rosdaya, 2014: 3)

Multikulturalisme adalah suatu paham yang mengakui dan menjunjung perbedaan dalam kesederajatan

baik secara individual maupun secara kebudayaan. Multikulturalisme memandang sebuah masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum layaknya sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik tersebut (Ibrahim, 2013: 133).

Andersen dan Cusher (1994) mengatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Keragaman kebudayaan menjadi sesuatu yang dipelajari dan berstatus sebagai objek studi. Dengan kata lain, keragaman kebudayaan menjadi materi pelajaran yang harus diperhatikan para pengembang kurikulum (Andersen dan Cusher, 1994: 320).

Namun pendidikan multikultural bukanlah sebatas membuat kurikulum berbasis lokal yang memasukkan muatan-muatan lokal. Jika begitu pendidikan multikultural hanya akan mempersiapkan anak didik dengan kesadaran budaya etniknya sendiri, padahal “tujuan pendidikan multikultur adalah untuk mempersiapkan anak didik dengan sejumlah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam lingkungan budaya etnik mereka, budaya nasional, dan antar budaya etnik lainnya” (Moeis, 2014: 10-11).

Pendidikan multikultural harus mampu mengakomodasi dan memberikan pembelajaran bagi peserta didik untuk mampu menciptakan budaya dan sikap toleran terhadap budaya lain. Dengan pendidikan multikultural, peserta didik diharapkan mampu memahami dirinya, orang lain, alam dan lingkungan budayanya (Ibrahim, 2013: 131).

Sementara itu, Kamanto Sunarto menjelaskan bahwa pendidikan multikultural biasa diartikan sebagai pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan yang menawarkan ragam model untuk keragaman budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan untuk membina sikap siswa agar menghargai keragaman budaya masyarakat (Sunarto, 2006: 47).

Kemudian Calarry Sada menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki empat makna (model). Keempat makna tersebut yaitu: (1) pengajaran tentang keragaman budaya sebuah pendekatan asimilasi kultural, (2) pengajaran tentang berbagai pendekatan dalam tata hubungan sosial, (3) pengajaran untuk memajukan pluralisme tanpa membedakan strata sosial dalam masyarakat, dan (4) pengajaran tentang refleksi keragaman untuk meningkatkan pluralisme dan kesamaan (Sada, 2004: 85).

Adapun istilah “pendidikan multikultural” dapat

digunakan baik pada tingkat deskriptif maupun normatif. Secara deskriptif, pendidikan multikultural akan menjelaskan isu-isu dan masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat multikultural, seperti toleransi, perbedaan etno-kultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, demokrasi dan pluralitas (Ibrahim, 2013: 141). Secara normatif, pendidikan multikultural memberikan pengetahuan yang benar tentang bagaimana seharusnya menyikapi isu-isu tersebut. Dede Rosdaya mengutip Will Kymlicka tentang materi-materi yang seharusnya dihantarkan dalam pendidikan multikultural adalah sebagai berikut (Kymlicka, 2000, dalam Rosdaya, 2014: 4-5).

- 1) Tentang hak-hak individual dan hak-hak kolektif dari setiap anggota masyarakat, yakni setiap individu dari suatu bangsa memiliki hak yang sama untuk terpenuhi seluruh hak-hak asasi kemanusiaannya, seperti hak untuk memeluk sebuah agama, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak atas kesempatan berusaha dan yang sebagainya. Demikian pula, secara kolektif, walaupun mereka berasal dari kelompok etnik minoritas dan tidak memiliki perwakilan dalam birokrasi dan lembaga legislatif, tapi mereka memiliki hak yang sama dengan kelompok mayoritas untuk menyampaikan aspirasi

politiknya, mengembangkan budayanya, dan yang sebagainya.

- 2) Tentang Kebebasan individual dan budaya, yakni bahwa setiap individu termasuk dari etnik minoritas memiliki kebebasan untuk berkreasi, berkarya, bahkan untuk mengembangkan dan memajukan budayanya. Kelompok etnik mayoritas harus menghargai hak-hak minoritas untuk mengembangkan kreativitas dan budayanya itu.
- 3) Tentang keadilan dan hak-hak minoritas, yakni seluruh anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dari negara, dan bahkan mereka juga memiliki hak untuk mengembangkan kultur etniknya, termasuk etnik minoritas yang harus mampu mengelola bahasa, dan berbagai institusi sosialnya, agar tidak hilang dalam budaya kelompok etnik minoritas.
- 4) Tentang jaminan minoritas untuk bisa berbicara dan keterwakilan aspirasinya dalam struktur pemerintahan atau legislatif. Mereka memiliki hak untuk bisa terwakili, tetapi, karena sistem kepartaian, seringkali kemudian ada kelompok-kelompok etnik, budaya dan kepentingan yang tidak terwakili, seperti wanita pekerja yang belum tentu terwakili di parlemen, etnik kecil yang belum

tentu terwakili sehingga aspirasi dan suaranya tidak bisa tersampaikan pada proses pengambilan keputusan tentang kebijakan pembangunan.

- 5) Tentang toleransi dan batas-batasnya, yakni bahwa etnik minoritas yang tidak memiliki wakil langsung di lembaga legislatif atau dalam lembaga birokrasi pemerintahan, harus dilindungi oleh etnik atau kelompok mayoritas yang menguasai lembaga-lembaga pemerintahan sebagai lembaga otoritatif untuk pengambilan kebijakan-kebijakan publik. Akan tetapi, mereka yang berusaha memperhatikan hak-hak minoritas tersebut memiliki berbagai keterbatasan, karena harus memperhatikan etnik atau kelompok mayoritas yang justru mereka wakili. Oleh sebab itu, hak-hak minoritas itu tetap memperoleh perhatian, namun dalam keterbatasan.

C. Tujuan Pendidikan Multikultural

Tujuan pendidikan multikultural dapat dikemukakan sebagai berikut (Ibrahim, 2013: 144-145):

- 1) Menegaskan, mempelajari serta menilai identitas dan warisan budaya seseorang;
- 2) Memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam;

- 3) Belajar bagaimana menilai pengetahuan dari perspektif yang berbeda;
- 4) Menghormati dan berkeinginan untuk memahami serta belajar tentang etnik/kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaan milik peserta didik;
- 5) Membantu peserta didik dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, dan kelompok keagamaan;
- 6) Membantu peserta didik dalam membangun hubungan lintas budaya;
- 7) Menanamkan kesan positif terhadap perbedaan kebudayaan itu sendiri, yaitu memandang keberadaan dari kelompok-kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat seseorang sebagai kebaikan yang positif untuk dihargai dan dipelihara.

Untuk mendukung tujuan-tujuan tersebut pendidikan multikultural mesti berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

- 1) Pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa. Keterbukaan ini harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan interpretasi-interpretasi yang berbeda;
- 2) Isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok;
- 3) Materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan

- konteks waktu dan tempat;
- 4) Pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa ke kelas;
 - 5) Proses pendidikan hendaknya memuat model belajar mengajar yang interaktif agar mudah dipahami (Ibrahim, 2013: 145).

D. Dimensi Pendidikan Multikultural

James Banks menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki lima dimensi yang saling berkaitan dan dapat membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa program yang mampu merespon terhadap perbedaan pelajar (Banks, 1994: 196), yaitu:

- 1) Dimensi integrasi isi/materi (*content integration*). Dimensi ini berkenaan dengan upaya-upaya guru untuk memasukkan informasi ke-etnis-an dalam pembelajaran, seperti memberikan contoh, data, maupun informasi dari berbagai kebudayaan ras atau etnis sebagai ilustrasi dalam menjelaskan konsep-konsep kunci dari mata pelajaran yang diajarkan.
- 2) Dimensi konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*). Dimensi ini berkenaan dengan prosedur bagaimana guru membantu siswa memahami materi pembelajaran dan bagaimana

posisi individual dan kelompok etnis/ras dan kelas sosial berpengaruh terhadap upaya memahami materi tersebut.

- 3) Dimensi pengurangan prasangka (*prejudice reduction*). Guru melakukan banyak usaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. Sebagai contoh, ketika anak-anak masuk sekolah dengan perilaku negatif dan memiliki kesalahpahaman terhadap ras atau etnik yang berbeda dan kelompok etnik lainnya, pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan perilaku *intergroup* yang lebih positif, dengan menyediakan kondisi bahan ajar yang multikultural. Dua kondisi yang dimaksud adalah bahan pembelajaran yang memiliki citra yang positif tentang perbedaan kelompok dan menggunakan bahan pembelajaran tersebut secara konsisten dan terus-menerus. Penelitian menunjukkan bahwa para pelajar yang datang ke sekolah dengan banyak stereotipe, cenderung berperilaku negatif dan banyak melakukan kesalahpahaman terhadap kelompok etnik dan ras dari luar kelompoknya. Penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan teksbook multikultural atau bahan pengajaran lain dan strategi pembelajaran yang kooperatif dapat

membantu para pelajar untuk mengembangkan perilaku dan persepsi terhadap ras yang lebih positif. Jenis strategi dan bahan dapat menghasilkan pilihan para pelajar untuk lebih bersahabat dengan ras luar, etnik dan kelompok budaya lain. Selain itu dimensi ini juga berkenaan pengentasan sikap rasial siswa dan strategi-strategi yang dapat digunakan untuk membantu mereka menumbuhkan sikap dan nilai-nilai yang lebih demokratis dan toleran. Strategi pembelajaran yang mungkin dapat digunakan adalah strategi-strategi pembelajaran yang lebih banyak menekankan aspek kerjasama antar etnis, dan penghargaan terhadap perbedaan etnis serta analisis nilai atau internalisasi nilai.

- 4) Dimensi pendidikan yang sama/adil (*equitable pedagogy*). Dimensi ini memperhatikan cara-cara, strategi dan aktivitas belajar yang dapat digunakan sebagai upaya memperlakukan pendidikan secara adil, antara lain dengan bentuk kerjasama (*cooperative learning*), dan bukan dengan cara-cara yang kompetitif (*competition learning*). Dimensi ini juga menyangkut pendidikan yang dirancang untuk membentuk lingkungan sekolah yang memiliki banyak jenis kelompok, termasuk kelompok etnik, kaum wanita, dan para pelajar

dengan kebutuhan khusus yang akan memberikan pengalaman pendidikan persamaan hak dan persamaan memperoleh kesempatan belajar. Selain itu, dimensi ini juga berkenaan dengan upaya guru memfasilitasi berbagai kelompok etnis atau kelas sosial agar mendapat kesempatan yang sama dalam perolehan pembelajaran. Diskriminasi pembelajaran tidak boleh terjadi karena semua anak harus mendapat peluang yang sama untuk mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kapasitas dirinya.

- 5) Dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*). Dimensi ini berkenaan dengan proses merestrukturisasi kebudayaan dan organisasi sekolah agar siswa dari berbagai etnis dan kelas sosial yang beragam memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Proses restrukturisasi ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi budaya siswa yang beranekaragam sebagai karakteristik struktur sekolah tersebut, yaitu memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda, seperti menjadikannya program ekstrakurikuler (misalnya tari tradisional).

Bagian V

Budaya Sekolah dan Penguatan Pendidikan Karakter

A. Hakekat Budaya Sekolah

Budaya berasal dari bahasa Latin, *colere* yang berarti segala daya upaya manusia untuk mengubah alam. Selanjutnya *colere* diterjemahkan dalam bahasa Inggris, *culture* dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kultur atau budaya. Istilah kultur dipergunakan pertama kali oleh Taylor (1924) dalam karya antropologinya dengan pengertian sebagai berikut, “*Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.*” Sejalan dengan pendapat Taylor tersebut, Sein (2004: 109) menyatakan, “*Culture lies at the intersection of social science and reflects some of the*

influence of each, specifically, those of anthropology, sociology, social psychology, and organizational behavior.”

Perbedaan pendapat antara Sein dengan pendapat Taylor adalah budaya menurut Taylor meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, pakaian, kemampuan, dan kebiasaan yang dibutuhkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat; sedangkan Taylor lebih menganggap budaya sebagai interaksi ilmu pengetahuan dan reflek yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi sosial, dan perilaku organisasi.

Sementara Short dan Greer (1997) mendefinisikan budaya sekolah sebagai tradisi, keyakinan, dan norma-norma di dalam sekolah, yang dapat dibentuk, diperkuat, dan dipelihara melalui pimpinan dan para guru sekolah. Proses yang efektif untuk membangun dan memperbaiki budaya sekolah adalah dengan mengajak para pemangku kepentingan untuk memperkuat jaringan yang dapat melahirkan komitmen semua warga sekolah dalam mendukung keberhasilan siswa. Dalam membangun budaya sekolah, pimpinan sekolah bersama-sama dengan guru harus memfokuskan perhatiannya pada perubahan organisasi secara menyeluruh.

Menurut Ajat (2004), hal itu dapat dilakukan melalui lima cara. *Pertama*, mendefinisikan peran yang harus dimainkan oleh pimpinan sekolah, guru, dan komunitas

sekolah melalui komunikasi yang terbuka dan kegiatan-kegiatan akademik yang dapat memberikan layanan terbaik terhadap harapan dan kebutuhan komunitas sekolah tertentu (siswa).

Kedua, menyusun mekanisme komunikasi yang efektif, seperti dengan melakukan pertemuan rutin baik itu mingguan atau bulanan di antara pimpinan sekolah, guru, dan karyawan; pihak sekolah dengan mitra, seperti dengan perguruan tinggi atau organisasi profesi tertentu; pihak sekolah dengan orang tua atau wali; dan pihak sekolah dengan pemerintah.

Ketiga, melakukan kajian bersama untuk mencapai keberhasilan sekolah, misalnya melalui pertemuan dengan sekolah-sekolah tertentu yang telah berhasil atau sekolah unggulan, maupun dengan melakukan studi banding. *Keempat*, melakukan visualisasi visi dan misi sekolah, keyakinan, nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang diharapkan sekolah. *Kelima*, memberikan pelatihan-pelatihan atau memberikan kesempatan kepada semua komponen sekolah untuk mengikuti berbagai pelatihan atau pengembangan diri, yang mendukung terwujudnya budaya sekolah yang diharapkan.

Dalam mendefinisikan budaya sekolah, siswa harus menjadi budaya sekolah, karena merupakan pelanggan utama yang harus dilayani melalui pendidikan yang professional. Ketika budaya sekolah dibentuk dalam

rangka mendukung siswa untuk belajar dan berprestasi, pimpinan sekolah dan guru dapat memodifikasi dengan jelas keyakinan tentang bagaimana siswa itu belajar dan menciptakan strategi yang akan membantu mereka mencapai keberhasilan (Englert, 2003).

B. Pengembangan Budaya (Kultur Sekolah)

Sekolah wajib menanamkan dan membiasakan nilai-nilai utama pada peserta didik sehingga nantinya mereka mampu mengamalkan nilai-nilai utama tersebut dalam kehidupannya. Kohlberg (Crain W., 200: 165) menyatakan bahwa *“wanted to see people advance to the highest possible stage of moral thought. The best possible society would contain individuals who not only understand the need for social order, but can entertain visions of universal principles, such as justice and liberty”*. Selanjutnya Bruner J. S. T.th., (1973: 52) menulis, *“for the limits of growth depend on how a culture assist the individual to use such intellectual potential as he may possess”*.

Seluruh aktivitas, program dan lingkungan sekolah harus mengajarkan pada peserta didik tentang nilai-nilai utama yang di anut. Dengan demikian mereka tidak hanya tahu akan baik dan buruk, tetapi menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari di keluarga dan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Gustafson J. M. (1975: 7) menyatakan, *morality cannot remain merely an*

intellectual exercise; it must be put to the test, and children must see it put to the test by themselves and by others around them in and out of the schools...Morality is put to the every day in schools, and we teachers are often found wanting in it.

Budaya sekolah yang baik dapat memperbaiki kinerja sekolah, baik kepala sekolah, guru, siswa, karyawan maupun pengguna sekolah lainnya. Situasi tersebut akan terwujud manakala kualifikasi budaya tersebut bersifat sehat, solid, kuat, positif, dan kolaborasi, ketahanan belajar, semangat terus maju, dorongan untuk bekerja keras dan belajar mengajar dapat diciptakan.

Zuchdi, Darmiyati (2013; 146) memaparkan salah satu pola pengembangan budaya sekolah, yaitu:

- 1) Persepsi tentang suasana sekolah yang mencakup suasana sekolah yang dipenuhi kerjasama, kepedulian, kejujuran, ketaatan beribadah, tanggung jawab, dan kenyamanan.
- 2) Perilaku peserta didik, dengan melakukan kontrol terhadap perilaku peserta didik sehingga tercapai peningkatan kedisiplinan, kejujuran, dan persaudaraan diantara peserta didik.
- 3) Kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah harus memiliki tanggung jawab tinggi, dapat diteladani, memiliki rasa kekeluargaan, demokratis, dan perhatian terhadap moral.

Budaya sekolah yang baik akan secara efektif menghasilkan kinerja yang terbaik pada setiap individu, kelompok kerja/unit dan sekolah sebagai satu institusi, dan hubungan sinergis antara tiga tingkatan tersebut. Budaya sekolah diharapkan memperbaiki mutu sekolah, kinerja di sekolah dan mutu kehidupan yang diharapkan memiliki ciri sehat, dinamis atau aktif, positif dan professional.

Budaya sekolah yang sehat akan memberikan peluang sekolah dan warga sekolah berfungsi secara optimal, bekerja secara efisien, energik, penuh vitalitas, memiliki semangat tinggi, dan akan mampu terus berkembang. Oleh karena itu, budaya sekolah ini perlu dikembangkan.

Menurut Zamroni budaya sekolah (kultur sekolah) sangat mempengaruhi prestasi dan perilaku peserta didik dari sekolah tersebut. Budaya sekolah merupakan jiwa dan kekuatan sekolah yang memungkinkan sekolah dapat tumbuh berkembang dan melakukan adaptasi dengan berbagai lingkungan yang ada.

Mulyasa E. (2013: 10) mengemukakan proses penciptaan lingkungan atau budaya sekolah yang kondusif dapat dilakukan melalui berbagai metode, diantaranya:

- 1) Penugasan
- 2) Pembiasaan
- 3) Pelatihan
- 4) Pembelajaran

- 5) Pengarahan
- 6) Keteladanan

Selanjutnya, dalam analisis tentang budaya sekolah dikemukakan bahwa untuk mewujudkan budaya sekolah yang akrab-dinamis, dan positif-aktif perlu ada rekayasa sosial. Dalam mengembangkan budaya baru, sekolah perlu memperhatikan dua level kehidupan sekolah: yaitu level individu dan level organisasi atau level sekolah. Level individu, merupakan perilaku siswa selaku individu yang tidak lepas dari budaya sekolah yang ada. Perubahan budaya sekolah memerlukan perubahan perilaku individu. Perilaku individu siswa sangat terkait dengan perilaku pemimpin sekolah. Dalam hal ini bisa perilaku kepala sekolah dan terutama guru, bagaimana mereka memperlakukan para siswa. Hal itu mencakup antara lain:

- 1) Bagaimana guru memberikan perhatian dan menangani masalah yang dihadapi siswa,
- 2) Bagaimana guru menanggapi masalah penting yang terjadi di sekolah, terutama yang menyangkut kepentingan siswa,
- 3) Bagaimana guru mengalokasikan sumber yang ada, terutama dalam memberi kesempatan untuk berkomunikasi secara mudah,
- 4) Bagaimana para guru memberikan contoh atau tauladan terhadap para siswanya, karena umumnya

siswa lebih banyak memperhatikan apa yang dilakukan para guru dari pada mendengarkan apa yang dikatakan guru

- 5) Bagaimana guru memberi *rewards* dan *punishment* atas prestasi dan perilaku siswanya.
- 6) Sedangkan pada level institusi atau sekoah, mencakup antara lain: bagaimana design dan pergedungan sekolah, sebab ini juga merupakan bagian dari kultur sekolah,
- 7) Sistem, mekanisme dan prosedur sekolah, seperti tata tertib sekolah, dll.
- 8) Bagaimana ritual, tata cara, dan kebiasaan yang ada di sekolah, seperti upacara sekolah, seragam sekolah dan sebagainya.
- 9) Apakah sekolah memiliki semboyan atau jargon yang menjadi kebanggaan seluruh warga sekolah?
- 10) Bagaimana filosofi, visi, dan misi sekolah serta bagaimana proses sosialisasinya.

Karyana, Nana (2014) mengungkapkan bahwa dalam lingkup tatanan dan pola yang menjadi karakteristik sebuah sekolah, kebudayaan memiliki dimensi yang dapat di ukur dan menjadi ciri budaya sekolah seperti:

- 1) Tingkat tanggung jawab, kebebasan dan independensi warga atau personil sekolah, komite sekolah dan lainnya dalam berinisiatif.
- 2) Bagaimana para personil sekolah dianjurkan

dalam bertindak progresif, inovatif dan berani mengambil resiko.

- 3) Bagaimana sekolah menciptakan dengan jelas visi, misi, tujuan, sasaran sekolah, dan upaya mewujudkannya.
- 4) bagaimana unit-unit dalam sekolah didorong untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi.
- 5) Bagaimana kepala sekolah memberi informasi yang jelas bantuan serta dukungan terhadap personil sekolah.
- 6) Jumlah pengaturan dan pengawasan langsung yang digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku personil sekolah.
- 7) Bagaimanapara personil sekolah mengidentifikasi dirinya secara keseluruhan dengan sekolah ketimbang dengan kelompok kerja tertentu atau bidang keahlian professional.
- 8) Bagaimana alokasi imbalan diberikan didasarkan atas kriteria prestasi.
- 9) Bagaimana personil sekolah didorong untuk mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka.
- 10) Bagaimana komunikasi antar personil sekolah dibatasi oleh hierarki yang formal (diadopsi dari karakteristik umum seperti yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins).

Dari sekian karakteristik yang ada, dapat dikatakan bahwa budaya sekolah bukan hanya refleksi dari sikap para personil sekolah, namun juga merupakan cerminan kepribadian sekolah yang ditunjukkan oleh perilaku individu dan kelompok dalam sebuah komunitas sekolah. Pembudayaan karakter dapat berupa kebijakan dan/atau aturan dengan segala sanksinya, namun yang lebih penting adalah melalui keteladanan dalam perilaku sehari-hari.

Aktivitas, program, dan lingkungan sekolah harus mengajarkan pada siswa tentang nilai-nilai utama, sehingga mereka bukan hanya tahu baik-buruk, tetapi menjalankannya dalam kenyataan dan interaksi sehari-hari di sekolah. Gustafson J.M., (1975: 7) menulis bahwa *Morality cannot remain merely an intellectual exercise; it must be put to the test, and children must see it put to the test by themselves and by others around them in and out of the schools...Morality is put to the test every day in schools, and we teachers are often found wanting in it.*

Ketika siswa terbiasa dengan perilaku, sikap, dan ucapan yang utama di sekolah, maka nilai-nilai utama bisa menjadi budaya bagi mereka, yang tidak akan mudah luntur oleh terpaan budaya-budaya negatif. Sebaliknya, budaya utama tersebut akan menjadi modal berharga bagi kehidupan siswa kelak. Karena, budaya luhur akan membawa pada keberhasilan dan bahkan kebahagiaan.

Jika ditinjau dari usaha peningkatan kualitas pendidikan, Djemari Mardapi (2003) membagi unsur-unsur budaya sekolah sebagai berikut:

- 1) Kultur sekolah yang positif adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, misalnya kerja sama dalam mencapai prestasi, penghargaan terhadap prestasi dan komitmen terhadap belajar.
- 2) Kultur sekolah yang netral yaitu kultur yang tidak berfokus pada satu sisi, namun dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini bisa berupa arisan keluarga sekolah, seragam guru, seragam peserta didik, dan lain-lain.

C. Pelaksanaan Budaya Sekolah

Pelaksanaan budaya sekolah secara garis besar dapat dibedakan menjadi empat yaitu kegiatan rutin sekolah, kegiatan spontan, keteladanan, dan pengkondisian.

1. Kegiatan rutin sekolah

Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan anak didik secara terus menerus dan konsisten setiap saat. Misalnya saja upacara pada hari besar kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan (kuku, telinga, rambut, dan lain-lain) setiap hari senin, beribadah bersama atau shalat bersama setiap dhuhur (bagi yang beragama islam),

berdoa saat mulai dan selesai pelajaran, mengucapkan salam bila bertemu teman, dan guru. Adapun contoh integrasi budaya sekolah dalam rangka mengimplementasikan pendidikan karakter dalam kegiatan rutin di sekolah sebagai berikut:

a. Religius

Bentuk pelaksanaannya yaitu:

- 1) Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran dengan dipimpin oleh agama melalui *speaker* dari ruang Guru.
- 2) Setiap hari Jum'at melaksanakan kegiatan infak bagi yang muslim.
- 3) Setiap pergantian jam pelajaran, siswa memberi salam kepada guru.
- 4) Melakukan shalat dhuhur berjama'ah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- 5) Memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk melakukan ibadah.
- 6) Anak diminta mengucapkan salam sebelum dan sesudah kegiatan, jika bertemu dengan guru, dalam berbicara maupun bertindak harus memperhatikan sopan santun.
- 7) Anak dibiasakan untuk mengucapkan terima kasih, maaf, permisi, dan tolong.
- 8) Mengetuk pintu sebelum masuk ke dalam ruangan orang lain.

b. Kedisiplinan

Bentuk pelaksanaannya yaitu:

- 1) Membuat catatan kehadiran pendidik dan peserta didik.
- 2) Seluruh warga sekolah melakukan senam kesehatan jasmani yang sudah dijadwalkan.
- 3) Pukul 07.15 semua siswa harus sudah berada di sekolah dengan toleransi keterlambatan 15 menit.
- 4) Siswa pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Bagi siswa yang melanggar diberikan sanksi berupa membersihkan lingkungan sekolah.
- 5) Pukul 07.15 semua guru harus sudah berada di sekolah.
- 6) Kerapian dan kebersihan pakaian, dicek setiap hari oleh seluruh guru, diawali oleh guru jam pertama.
- 7) Siswa yang tidak berpakaian rapi diminta merapikannya, dan diberitahu cara berpakaian rapi.
- 8) Kerapian rambut, dicek setiap hari oleh seluruh guru, panjang ukuran rambut tidak boleh kena telinga dan kerah baju.
- 9) Guru dan pegawai berpakaian rapi.
- 10) Mengambil sampah yang berserakan.

c. Peduli lingkungan

Bentuk pelaksanaannya yaitu:

- 1) Membiasakan anak untuk membuang sampah

pada tempatnya.

- 2) Siswa membuang sampah kelas ke TPS.
- 3) Petugas kebersihan sekolah memungut sampah yang ada di tempat sampah, di kantor dan diluarjangkauan siswa untuk langsung dibuang ke TPS.
- 4) Guru melaksanakan piket secara berkelompok untuk melihat kebersihan lingkungan.
- 5) Mengambil sampah yang berserakan.
- 6) Piket kelas secara kelompok untuk membersihkan kelasnya.
- 7) Siswa secara individu menata bangku dan kursi setiap hari supaya terlihat rapi.
- 8) Tidak merusak fasilitas sekolah.

d. Peduli Sosial

Bentuk pelaksanaannya yaitu:

- 1) Mengumpulkan barang-barang yang masih layak pakai di sekolah dan menyumbangkannya pada yang membutuhkan.
- 2) Mengumpulkan sumbangan pada momen tertentu.
- 3) Mengunjungi teman yang sakit.

e. Kejujuran

Adapun bentuk pelaksanaannya yaitu:

- 1) Menyediakan tempat temuan barang hilang
- 2) Transparansi laporan keuangan sekolah

3) Menyediakan kotak saran dan pengaduan

4) Larangan mencontek saat ujian.

f. Cinta Tanah Air

1) Bentuk pelaksanaannya yaitu:

2) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

3) Menyanyikan lagu kebangsaan setiap upacara bendera dan peringatan hari besar nasional.

4) Memajang foto presiden dan wakil presiden serta lambing negara.

5) Memajang foto para pahlawan nasional.

6) Menjunjung tinggi kebhinekaan.

2. Kegiatan spontan

Kegiatan spontan adalah kegiatan yang dilakukan secara spontan pada saat itu juga. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat guru atau tenaga kependidikan yang lain mengetahui adanya perbuatan yang kurang baik dari peserta didik, yang harus dikoreksi pada saat itu juga. Apabila guru mengetahui adanya perilaku dan sikap yang kurang baik, maka pada saat itu juga guru harus melakukan sehingga peserta didik tidak akan melakukan tindakan yang tidak baik itu. Misalnya, ketika ada peserta didik yang membuang sampah tidak pada tempatnya, berteriak-teriak, sehingga mengganggu pihak lain, berkelahi, memalak, berlaku tidak sopan, mencuri, berpakaian tidak

senonoh, maka guru atau tenaga kependidikan lainnya, harus cepat mengkoreksi kesalahan yang dilakukan anak didik tersebut.

Kegiatan spontan ini tidak saja berlaku untuk perilaku dan sikap peserta didik yang tidak baik, tetapi perilaku yang baik harus direspon secara spontan dengan memberikan pujian. Misalnya ketika anak didik, memperoleh nilai tinggi, menolong orang lain, memperoleh prestasi dalam olahraga atau kesenian, berani menentang atau mengkoreksi perilaku teman yang tidak terpuji.

3. Keteladanan

Keteladanan adalah perilaku dan sikap guru maupun tenaga kependidikan yang lain dalam memberikan contoh terhadap tindakan-tindakan yang baik, sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya. Jika guru dan tenaga kependidikan yang lain menghendaki agar peserta didik berperilaku atau bersikap sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, maka guru dan tenaga kependidikan yang lain adalah orang yang pertama dan utama memberikan contoh berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai itu. Misalnya saja berpakaian rapi, datang tepat waktu, bekerja keras, bertutur kata sopan, kasih sayang atau perhatian terhadap peserta didik, menjaga kebersihan.

4. Pengkondisian

Dalam rangka mendukung pelaksanaan budaya sekolah guna mengimplimentasikan nilai-nilai pendidikan karakter, maka sekolah harus dikondisikan sebagai pendukung kegiatan tersebut. Sekolah harus mencerminkan kehidupan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang diinginkan. Misalnya, toilet yang selalu bersih, bak sampah ada diberbagai tempat dan selalu dibersihkan, sekolah terlihat rapi, dan alat belajar ditempatkan dengan teratur.

Bagian VI

Integrasi Merdeka Belajar dalam Pendidikan Karakter

A. Konsepsi Merdeka Belajar

Merdeka Belajar adalah program kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Makarim Anwar dan disampaikan dalam pidato pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2019. Berikut adalah petikan pidato yang menyinggung konsepsi Merdeka Belajar tersebut.

“Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia sekaligus tersulit. Anda ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberi aturan dibandingkan dengan pertolongan. Anda ingin membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas, tetapi waktu

Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul bahwa potensi anak tidak dapat diukur dari hasil ujian, tetapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tetapi kurikulum yang begitu padat menutup petualangan. Anda frustrasi karena Anda tahu bahwa di dunia nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu bahwa setiap anak memiliki kebutuhan berbeda, tetapi keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tetapi Anda tidak diberi kepercayaan untuk berinovasi.” (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/11/pidato-mendikbud>).

Berdasarkan petikan pidato tersebut, terlihat bahwa esensi dari Merdeka Belajar adalah untuk memberikan kemerdekaan dan kebebasan kepada para guru terlebih dahulu dari beban birokrasi dan administrasi. Menurut Mendikbud, kemerdekaan belajar harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada peserta didik. Mendikbud menyebut, dalam kompetensi guru di level apa pun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Konsep Merdeka Belajar ala Mendikbud didorong oleh

keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu.

Melalui kebijakan Merdeka Belajar ini, pada tahun-tahun mendatang, sistem pengajaran akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran ini akan lebih terasa nyaman, karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan *outing class*, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem *ranking* yang selama ini hanya meresahkan anak dan orang tua.

Konsep Merdeka Belajar akan membebaskan peserta didik dari sistem *ranking* yang membebani dan tidak adil. Dikatakan tidak adil karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Nantinya, akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat.

B. Landasan Hukum Pelaksanaan Merdeka Belajar

Staf Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian, Setditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud, R. Suyato Kusumaryono, menyebut beberapa landasan hukum bagi kebijakan Merdeka Belajar. Dasar-dasar

hukum tersebut juga menyertai upaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang dilandasi tanggungjawab untuk menjalankan amanat: (a) Pembukaan UUD 1945 alinea IV: dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (b) Pasal 31, pada ayat 3, yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (c) UU Sisdiknas Tahun 2003; menimbang bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan; dan (d) UU Sisdiknas tahun 2003, Pasal 3: menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (<https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/merdeka-belajar>).

Adapun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021 pada 18 Februari 2020 yang mengatur lebih lanjut salah satu kebijakan pokok Merdeka Belajar. Surat Edaran tersebut juga memiliki dua dasar hukum, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

C. Tahapan Implementasi Merdeka Belajar

Staf Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian, Setditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud, R. Suyato Kusumaryono menjelaskan beberapa tahapan yang akan dilalui untuk mengimplentasikan kebijakan Merdeka Belajar. *Pertama* adalah pembuatan landasan hukum untuk menguatkan kebijakan pendidikan Merdeka Belajar, khususnya pada wacana mengganti UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survey Karakter

ditahun 2021, dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang intinya masih mengatur terkait pelaksanaan UN, beserta nomenklatur nya.

Kedua, terkait Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter; (a) Meskipun ini masih dalam proses pematangan, karena nantinya guru yang bakal melaksanakannya, penting untuk adanya panduan dalam memahami betul apa yang dimaksud Asesmen Kompetensi Minimum, serta kejelasan teknis survei karakter; dan (b) termasuk pula panduan untuk soal literasi dan numerasi.

Ketiga, terkait Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran; (a) dengan disederhanakannya RPP jelas akan mengurangi beban administrasi guru, namun dengan memberikan kebebasan kepada guru dalam menyusun RPP dirasa sangat riskan, mengingat guru selama ini sangat bergantung pada petunjuk teknis, disamping guru-guru selama ini umumnya belum maksimal membuat RPP secara mandiri, lebih condong untuk melakukan *copypaste*; dan (b) mempertimbangkan bahwa kondisi kompetensi guru di daerah yang masih banyak ketimpangan, perlu dilakukan pelatihan yang terus-menerus termasuk membuat prosedur membuat RPP yang baik.

Bagaimanapun kebijakan Merdeka Belajar ini patut disambut dan diapresiasi, serta tetap optimis apa yang digagas oleh Mendikbud merupakan upaya keras untuk melakukan berbagai terobosan inovasi pendidikan sebagai reformasi guna majunya pendidikan di tanah air, karena tidak mudah dalam menciptakan sebuah formula dalam menjawab tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Jika kebijakan Merdeka Belajar ini sudah diimplementasi dengan baik, harapannya kebijakan Merdeka Belajar sebagai program baru bagi arah pembelajaran ke depan tidak berbenturan, bahkan sebaliknya menjadi sebuah kebijakan yang terhubung dengan program-program pendidikan sebelumnya, seperti; Sekolah Ramah Anak (SRA), Sekolah Sehat, Sekolah Bebas dari Perundungan (bully), Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Penguatan Pendidikan Karakter seperti toleransi, saling menghargai, saling menghormati, dan Pembelajaran PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan).

Kebijakan Merdeka Belajar dapat dianggap sebagai merupakan sebuah Grand Design pendidikan nasional yang bertujuan untuk mengubah secara fundamental dan mengakselerasi lahirnya SDM Indonesia Unggul, berkarakter, cerdas, dan berdaya saing. Mengingat pada kondisi sekarang ini begitu mendesak tuntutan untuk melakukan investasi besar-besaran pada pengembangan

kualitas sumber daya manusia (SDM), karena salah satu targetnya adalah guna mempersiapkan Generasi Emas 2045, menyambut 100 tahun Indonesia merdeka, dengan capaian tingkat kesejahteraan, keharmonisan, dan kemartabatan yang tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum

D. Pokok-Pokok Kebijakan Merdeka Belajar

Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud RI tertuang dalam paparan Mendikbud RI di hadapan para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, Jakarta, pada 11 Desember 2019. Ada empat pokok kebijakan baru Kemendikbud RI, yaitu:

1) Penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) resmi menghapus Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaa Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) mulai tahun ini. Penghapusan USBN merupakan amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 43 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Hal ini berarti pembuatan soal maupun penyelenggaraan USBN akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak

sekolah. Sekolah diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan ujian, karena diselenggarakan oleh sekolah maka menjadi tugas pemerintah daerah melalui dikbud untuk memonitor dan mengevaluasi serta memastikan bahwa ujian yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah ujian yang berkualitas. Hal ini penting untuk dilakukan karena erat hubungannya dengan mutu pendidikan. Dikbud harus memfasilitasi terutama dari segi anggaran agar pelaksanaan ujian berjalan lancar, selain itu juga harus mengadakan pelatihan pembuatan soal yang sesuai dengan standar atau kriteria yang harus dipenuhi (Baro'ah, 2020: 1067).

2) Penghapusan Ujian Nasional

Ujian Nasional (UN) adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar, dan menengah. UN merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pemerintah telah diselenggarakan sejak puluhan tahun lalu dan telah berulang kali mengalami perubahan pada setiap periodenya. Ujian Nasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi momok yang sangat menakutkan dan menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Banyak sekali paradigma dan anggapan-anggapan mengenai Ujian

Nasional, namun tahun ini UN disambut dengan rasa penuh suka cita, pasalnya Menteri Pendidikan Nadiem Makarim telah memutuskan untuk menghapuskan UN. Dengan dihapuskannya UN ini, diharapkan akan membuat siswa tidak mengalami tekanan beban mental, karena kelulusannya dari jenjang pendidikan tertentu tidak ditentukan oleh nilai yang diperoleh hanya dalam beberapa hari saja.

Namun dengan begitu bukan berarti tidak ada yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Ujian Nasional akan diganti dengan sistem yang baru, yaitu Assesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Konsep ini merupakan penyederhanaan dari sistem UN, berbeda dengan UN yang dilakukan pada akhir jenjang pembelajaran, asesmen ini akan dilaksanakan ketika anak duduk di kelas 4, 8 dan 11. Dan hasil dari assesmen ini akan dijadikan sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya.

Selain asesmen kompetensi, akan diberlakukan juga survei karakter, dimana survei karakter ini digunakan untuk mengetahui karakter anak dan bagaimana keadaan lingkungan di sekolah. Survei karakter juga digunakan untuk menjadi indikator atau tolak ukur agar sekolah memberikan umpan balik bagi kegiatan pembelajaran, terutama dalam mengimplementasikan nilai-nilai karakter ke dalam diri siswa. Sehingga nantinya nilai

karakter tersebut akan terinternalisasi ke dalam diri siswa yang secara otomatis akan berdampak pada prestasi dan kualitas siswa tersebut (Baro'ah, 2020: 1067-8).

3) Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disingkat dengan RPP merupakan pegangan seorang guru dalam mengajar. Seorang guru sebelum masuk kelas wajib menyusun RPP agar pembelajaran yang dilakukan lebih terarah dan sesuai indikator yang dikembangkan. Kebijakan baru terkait dengan penyusunan RPP telah dikeluarkan oleh menteri pendidikan yang tertuang dalam Surat Edaran No 14 tahun 2019 tentang Penyederhanaan RPP. Berbeda dengan RPP sebelumnya yang mencakup lebih dari sepuluh komponen, pada RPP yang baru terjadi penyederhanaan yaitu hanya terdapat 3 komponen inti dalam RPP yang sesuai dengan edaran menteri pendidikan no 14 tahun 2019 yaitu; tujuan pembelajaran, langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau assesment. Dengan adanya kebijakan ini, guru akan lebih mudah dan diberikan kebebasan untuk membuat dan mengembangkan RPP seefektif dan seefisien mungkin, akan tetapi tetap berorientasi pada perkembangan anak (Baro'ah, 2020: 1068).

4) Memperluas Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru

Sistem zonasi adalah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat

tinggal. Zonasi merupakan salah satu kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar tercipta pemerataan akses layanan pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan nasional.

Sebenarnya sistem ini sudah diberlakukan sejak masa menteri sebelumnya, akan tetapi ada perbedaan dalam pelaksanaannya dengan sistem zonasi yang sekarang ini. Tentunya sebelum diterapkan, sistem ini sudah dilakukan pengkajian, serta memperhatikan rekomendasi dari lembaga-lembaga yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi.

Salah satu perbedaan yang mendasar dari sistem zonasi yang lalu dengan era menteri sekarang adalah kuota siswa dari jalur zonasi. Sistem zonasi yang awalnya memiliki kuota minimum 80% dari kuota total 100%, sisanya diperuntukan untuk jalur prestasi dan perpindahan. Pada sistem zonasi yang sekarang berubah menjadi jalur zonasi 50%, afirmasi 15%, perpindahan 5%, dan jalur prestasi 30 persen. Perubahan persentase melalui jalur prestasi bertambah yang awalnya hanya 15% menjadi 30%, hal ini dilakukan karena ada kasus di beberapa daerah yang mengalami kesulitan atas diberlakukannya sistem zonasi lama, dengan adanya perubahan pada presentase tersebut diharapkan mekanisme penerimaan siswa baru bisa mengakomodasi perbedaan situasi dan kondisi pada setiap daerah. Zonasi ini tidak hanya mengatur pemerataan

kualitas sekolah dan siswa, tetapi juga menitikberatkan pada kuantitas dan kualitas guru di suatu daerah yang nantinya akan menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah (Baro'ah, 2020: 1068-9).

E. Prinsip-Prinsip Merdeka Belajar

Prinsip-prinsip Merdeka Belajar dapat dikemukakan seperti berikut.

- 1) Beragam waktu dan tempat; yaitu proses belajar bukan hanya di ruang kelas, durasi di kelas jadi berkurang, banyak waktu belajar di waktu serta ruang berbeda, sistem belajar dibalik: teoritis lebih banyak di luar kelas sedangkan praktis di dalam kelas.
- 2) Berbasis Proyek; yaitu siswa diajak menerapkan keterampilan yang ia sudah pelajari dalam berbagai situasi. Seperti belajar bagaimana cara instalasi komputer, memecahkan kode struktur, dan *coding*. Jadi pengalamannya akan terasa untuk nantinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya.
- 3) *Free Choice*; yaitu perangkat, program dan teknik belajar sesuai siswa, mempraktikkan cara belajar yang paling dirasa nyaman sehingga kemampuannya terus terasah.
- 4) *Personalized Learning*; yaitu menyesuaikan peserta

didik dalam memahami materi, memecahkan jawaban sesuai dengan kemampuannya. Ibarat bermain *game* yang mampu memecahkan tantangan akan cepat naik level jadi bukan lagi cara memukul rata kemampuan siswa.

- 5) Pengalaman Lapangan; yaitu, *link and match* di dunia pekerjaan sangatlah penting. Saat ini banyak sekali materi yang diajarkan di bangku sekolah yang tidak berhubungan dengan dunia kerja. Pada pendidikan di era 4.0 akan banyak membutuhkan pengalaman lapangan saat masih di sekolah yang akan dipraktikkan di dunia kerja.
- 6) *Interpretasi Data*; yaitu setiap siswa akan diberi kesempatan untuk lebih banyak tahu mengenai komputer dan analisa data. Mengingat di era revolusi industri 4.0 sangat banyak bersinggungan dengan data. Peran *Big Data* sangat sentral dalam memecahkan masalah yang ada. Data tersebut bisa digunakan sesuai kebutuhan dan menganalisa sejumlah masalah jadi solusi akhir.

F. Merdeka Belajar dan Penguatan Pendidikan Karakter

Kebijakan Merdeka Belajar memiliki banyak kaitan dengan gerakan Penguatan Pendidikan Karakter. Beberapa kaitan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

1) Proses Pembelajaran Merdeka dan Pendidikan Karakter

Pembelajaran merupakan kegiatan belajar mengajar yang berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Dari proses pembelajaran akan terjadi hubungan timbal balik antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses pembelajaran hendaknya dirancang agar dapat menumbuhkan motivasi dan mendukung siswa untuk memiliki empat kompetensi yang harus dimiliki oleh generasi bangsa dalam menghadapi abad-21. Keempat kompetensi tersebut sering disebut dengan 4C yaitu *communication* (komunikasi), *collaboration* (kerjasama), *critical thinking* (berpikir kritis), *creativity* (daya cipta). Selain empat kompetensi tersebut, pendidikan juga harus menumbuhkan karakter pada diri siswa. Pendidikan karakter dalam konteks saat ini sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang menimpa generasi muda di negara ini. Dengan dimasukkannya keempat kompetensi dengan ditambah penguatan pendidikan karakter diharapkan akan menghasilkan mutu lulusan yang berkualitas (Baro'ah, 2020: 1070).

2) Kemerdekaan dan Komitmen Guru

Dalam pendidikan guru memiliki peran yang sangat penting, karena sebaik apapun sistem pendidikan tanpa didukung dengan adanya guru yang bermutu maka sistem itu tidak akan berfungsi. Guru juga merupakan

orang yang paling bertanggungjawab untuk menyediakan lingkungan pendidikan yang serasi agar terjadi proses belajar yang efektif. Terkait pada point pertama yaitu proses pembelajaran, dimana proses pembelajaran yang menyenangkan, penuh dengan kreativitas dan inovasi akan mendorong termotivasinya anak dalam belajar.

Oleh karena itu, dalam kebijakan ini, guru lebih ditekankan pada proses pembelajarannya, bukan pada administrasinya. Dengan berkurangnya beban guru terkait dengan administrasi maka diharapkan para guru akan lebih meningkatkan kompetensi profesionalnya dalam pembelajaran.

Selain itu, dalam kebijakan ini guru juga diharapkan memiliki dua kompetensi tambahan yaitu *Computational Logic* dan *Compassion*. *Cumputational logic* adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh dan logis. Ketika sudah terbiasa dengan kompetensi ini, guru akan lebih berpikir kritis sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan secara efektif dan efisien. *Compassion* ini merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru ketika mengajar, karena *compassion* ini secara tidak langsung akan membangun integritas.

Seorang guru harus memiliki minat dan bakat yang tinggi dalam profesinya. Dalam artian guru harus mencintai profesi yang ditekuninya, karena ketika

seseorang telah memiliki compassion maka akan memiliki motivasi yang tinggi untuk terus memperbaiki dan mengembangkan diri. Dengan menguasai kompetensi yang sudah ada, dengan ditambah dua kompetensi baru tersebut, diharapkan kemampuan guru tidak diragukan lagi dan guru bebas melaksanakan aktivitas pembelajaran secara kreatif dan inovatif (Baro'ah, 2020: 1071)

3) Kepemimpinan Kepala Sekolah

Salah satu kunci yang sangat menentukan keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuannya adalah kepala sekolah. Keberhasilan kepala sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan secara dominan ditentukan oleh keandalan manajemen sekolah yang bersangkutan, sedangkan manajemen sekolah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan kepala sekolah. Dalam lingkungan pendidikan, kepemimpinan pendidikan adalah kepemimpinan yang fokus pada peningkatan mutu pendidikan. Dalam manajemen sekolah, kepala sekolah harus memastikan hubungan ekosistem yang ada disekolah antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan siswa, dan seluruh warga sekolah harus terjalin dengan baik. Selain itu, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan visioner dan memiliki kreatifitas yang tinggi.

Kedua kemampuan tersebut terlihat dari sikap demokratis, kreatif, dan keteladanan yang tampak dalam

diri kepala sekolah. Sikap demokratis yang dimaksud di sini yaitu kepala sekolah harus memahami keberadaan guru, baik segi kelebihan maupun kelemahannya.

Kepala sekolah yang demokratis selalu menerima masukan dari guru dan secara terus menerus memberikan bimbingan yang efektif. Kepala sekolah yang demokratis juga harus memberikan kesempatan kepada guru untuk lebih kreatif, dan tidak menghambat setiap kemajuan yang tampak dalam diri guru yang menjadi mitra kerjanya.

Apa yang dimaksud dengan kreatif di sini, yaitu kepala sekolah harus memiliki kreativitas yang tinggi untuk kemajuan sekolah yang dipimpinnya. Kreativitas tinggi ini menyangkut tiga dimensi yaitu proses, person, dan produk. Dalam artian dengan menggunakan proses yang bervariasi sebagai kriteria dari kreativitas maka segala produk yang dihasilkan akan menjadi produk yang kreatif.

Kepala Sekolah juga dituntut untuk menjadi teladan baik secara moral maupun profesional. Secara moral artinya perilaku kepala sekolah benar-benar menjadi teladan baik bagi guru, siswa maupun masyarakat. Secara profesional kepala sekolah harus mampu membuktikan bahwa dalam bekerja tidak hanya didasarkan pada ego atau keinginannya saja, akan tetapi menggunakan pedoman dan prinsip yang jelas. Dengan demikian sasaran yang dicapai akan sesuai dengan kriteria profesional

yang ditetapkan. Dalam rangka pencapaian mutu, kepala sekolah menjadi vital peranannya, karena sekolah yang bermutu akan tergambar dari kebijakan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya (Baro'ah, 2020: 1071-2).

Daftar Pustaka

- Ajat Sudrajat. 2014. *Budaya Sekolah dan Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Intan Media
- Amaruddin, Hidar, Atmaja, Tri H., Khafid, Muhammad. 2020. “Peran Keluarga dan Media Sosial dalam Pembentukan Karakter Santun Siswa di Sekolah Dasar” dalam *Jurnal Pendidikan Karakter, No. 1, blm. 33-48*.
- Andersen dan Cusher. 1994. “Multicultural and Intercultural Studies” dalam *Teaching Studies of Society and Environment* disunting oleh C. Marsh. Sydney: Prentice-Hall.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas. 2011. *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kemendiknas.
- Banks, James. 1994. *Multiethnic Education: Theory and Practice*, edisi ketiga. Boston: Allyn and Boston.
- Baro’ah, Siti. 2020. “Kebijakan Merdeka Belajar sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan” dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal Tawadhu, Vol. 4, No. 1, hlm. 1063–1073.*
- Bennett. William. J. 1991. *The Children's Book of Heroes*.
Cassette: Abridged
- Bruner. J. S. T.th. *The Relevance of Education*. New York:
Norton Library.
- BSNP. 2006. *Panduan Umum Penilaian Pendidikan*. BNSP.
- Burnett, N. 2008. "The Delors Report: A Guide towards Education for
All" in *European Journal of Education*, Vol.43, No.2, pp.181-187.
- Christiaan Grootaert, Deepa Narayan, Veronica Nyhan
Jones, dan Michael Woolcock. 2004. *Measuring
Social Capital: An Integrated Questionnaire*.
Washington, D.C.: The World Bank.
- Coleman, James S. 1990. *Foundations of Social Theory*.
Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Crain. W. 2000. *Theories of Development; Concepts and
Applications*. New Jersey: Prentice Hall.
- Delors, Jacques. *et al.* 1996. *Learning: The Treasure Within*. Paris:
UNESCO [United Nations Educational, Scientific, and
Cultural Organization].
- Dewantara, Ki Hadjar. 1962. *Karya Bagian I: Pendidikan*. Jogyakarta:
Penerbit MLPTS [Madjelis Luhur Perguruan Taman Siswa].
- Dijck, J. Van. 2013. *The Culture of Connectivity: A Critical
History of Social Media*. New York: Oxford University
Press.
- Djemari Mardapi. 2003. *Pengembangan Kultur Sekolah*,
makalah disajikan dalam Seminar Pengembangan

DAFTAR PUSTAKA

- Kultur Sekolah di Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dwiningrum, S. I. A. 2014. *Modal Sosial dalam Pengembangan Pendidikan dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Ferreira, G. B dan Borges, Susana. 2020. “Media and Misinformation in Times of COVID-19: How People Informed Themselves in the Days Following the Portuguese Declaration of the State of Emergency” dalam *Journal Media*, hlm. 108-121.
- Gardner, Howard. 2003. *Kecerdasan Majemuk*. (Terjemahan Alexander Sindoro). Bandung: Rosdakarya
- Gustafson, J.M. et. all. 1975. *Moral Education: Five Lectures*. Cambridge and London: Harvard University Press.
- Hadiwinata, K., Mundzir, H., dan Muslim, S. 2020. “Analisis Peran Media Sosial Instagram sebagai Media Pemasaran dan *Branding* Bisnis di Era Pandemi COVID-19” dalam *SENABISMA*, Vol. 6., hlm. 62-68.
- Hewitt, Des. 2008. *Understanding Effective Learning Strategies for the Classroom*. Great Britain: Open University Press.
- Ibrahim, Rustam. 2013. “Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam” dalam *Addin*, Vol. 7, No.1, hlm. 129-154.
- Isnarmi Moeis. 2014. *Pendidikan Multikultural Transformatif, Integritas Moral, Dialogis, dan Adil*.

DAFTAR PUSTAKA

- Padang: UNP Press.
- Kaplan, Andreas M., dan Haenlein, Michael. 2010 “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media” dalam *Business Horizons Vol. 53, No. 1, hlm. 59–68*.
- Kemendiknas. 2010. *Desain Induk Pendidikan Karakter*. Jakarta
- Kevin, Ryan dan Karen, Bohlin. 1999. *Building Character in Schools*. San Fransisco: John Willey & Sons.
- Koesoma. Doni. 2007. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo
- Krishnamurthy, Balachander dan Cormode, Graham. 2008. “Key differences between Web 1.0 and Web 2.0” dalam *First Monday, Vol. 13, No. 6*.
- Lickona, Thomas. 1991. *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Mulyasa. E. 2013. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Nahapiet, J. dan Ghoshal, S. 1998. “Social capital, intellectual capital and the organizational advantage” dalam *Academy of Management Review, Vol. 23 No. 2, hlm. 242–266*.
- Narayan, Deepa dan Michael F. Cassidy. 2001. “A Dimensional Approach to Measuring Social Capital: Development and Validation of a Social Capital Inventory” dalam *Current Sociology, Vol. 49*,

DAFTAR PUSTAKA

No. 2.

- Normina. 2017. "Pendidikan dalam Kebudayaan" dalam *Ittibad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan, Vol. 15, No. 28*.
- Puslit KP2W Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran. 2008. "Pemetaan dan Pemanfaatan Modal Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Barat". *Laporan Akhir Penelitian*. Sumedang: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- Putnam, R. D. 1995. "Tuning in, tuning out: The strange disappearance of social capital in America" dalam *Political science and politics, Vol. 28, No, 4, hlm. 664-683*.
- Rahmawati, E. R. dan Wahyudi, Ari. 2017. "Analisis Modal Sosial Pada Pelaksanaan Pendidikan di SMAN Model Terpadu Bojonegoro" dalam *Paradigma, Vol. 5, No. 3*
- Rosdaya, Dede. 2014. "Pendidikan Multikultural di Indonesia: Sebuah Pandangan Konseptual" dalam *Sosio Didaktika, Vol. 1, No. 1, 1-12*.
- Sada, Clarry. 2004. "Multicultural Education in Kalimantan Barat: an Overview" dalam *Multicultural Education in Indonesia and South East Asia, First Edition*.
- Santrock, J. W. 2004. *Life-Span Development*. McGraw-Hill Company, Inc.
- Sunarto, Kamanto. 2004. "Multicultural Education in

DAFTAR PUSTAKA

- Schools, Challenges in its Implementation” dalam *Multicultural Education in Indonesia and South East Asia, First Editon*.
- Syahra, Rusydi. 2003. “Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi” dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 5 No. 1, hlm. 1-22*.
- Tang, Qilin, Zhang, Kai, dan Li, Yan. 2020. “The Important Role of Social Media During the COVID-19 Epidemic” dalam *Disaster Medicine and Public Health Prepadness, hlm. 1-2*.
- Tim PKK Kemendikbud. 2016. *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, edisi kedua*. Jakarta: Kemdikbud.
- Wardani, Kristi dan Sumiyati, Yohana. 2014. “Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pengelolaan Modal Sosial Pada Pembelajaran di Sekolah Dasar” dalam *Seminar Nasional Riset Inovatif II, hlm. 222-229*.
- Wijaya, Hengki dan Tulak, Harmelia. 2019. “Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Karakter Berbasis Media Sosial”, hlm. 1-9.
- Will Kymlicka. 2000. *Multicultural Citizenship, A Liberal Theory of Minority Rights*. New York: Oxford University Press.
- Zubaedi. 2012. *Desain Pendidikan Karakter; Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta:

DAFTAR PUSTAKA

Kencana.

Zuchdi, Darmiyati dkk. 2013. *Panduan Implementasi Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran dan Pengembangan Kultur Sekolah*. Yogyakarta: Multi Presindo

Sumber Internet:

<https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/merdeka-belajar>

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/11/pidato-mendidbud>

Biodata Penulis



Dr. Kurotul Aeni S.Pd., M.Pd, perempuan kelahiran Kendal, 28 Juli 1961 merupakan Dosen Jurusan Pendidikan Sekolah Dasar (PGSD), Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Ia mengenyam pendidikan sarjana di Jurusan PMP/KN IKIP Veteran Semarang, lalu pendidikan magisternya mengambil bidang studi PIPS/ Pendidikan Nilai di Universitas Negeri Yogyakarta. Sementara pendidikan doktoralnya juga ditempuh di Universitas Negeri Yogyakarta dengan mengambil studi ilmu pendidikan.

Saat mengambil pendidikan doktoralnya, Ia mengangkat disertasi tentang “Pendayagunaan Modal Sosial Dalam Pendidikan Karakter (Studi Kasus Di SD Sapen & SD Budi Mulia Dua Yogyakarta)”. Ketertarikannya terhadap kajian pendidikan karakter

Biodata Penulis

juga dilanjutkan dengan beberapa kali mengambil topik pendidikan karakter dalam penelitian yang dilakukan.

Maka tidak heran, selama menjadi dosen di Universitas Negeri Semarang mendapatkan amanah untuk mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Mulai dari mata kuliah Pendidikan PKn SD, Pengembangan Pembelajaran PKn SD, Pendidikan IPS SD, sampai Pengembangan Pembelajaran PKn SD.

